IMPLEMENTASI PROGRAM SOSIAL BANK INDONESIA KANTOR PERWAKILAN WILAYAH SULAWESI SELATAN DALAM

RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SULAWESI SELATAN (STUDI KASUS PENGEMBANGAN DESA WISATA BINAAN RAMMANG-RAMMANG KABUPATEN MAROS)

SKRIPSI

OLEH MARSYAD ALGANAWI SALAM NIM 105710202014



PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN FAKUTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR MAKASSAR

2018

IMPLEMENTASI PROGRAM SOSIAL BANK INDONESIA KANTOR PERWAKILAN WILAYAH SULAWESI SELATAN DALAM

RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SULAWESI SELATAN (STUDI KASUS PENGEMBANGAN DESA WISATA BINAAN RAMMANG-RAMMANG KABUPATEN MAROS)

OLEH MARSYAD ALGANAWI SALAM NIM 105710202014

SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan

PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN FAKUTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR MAKASSAR 2018

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan

Untuk kedua orang tua, sahabat dan orang disekeliing saya yang senangtiasa mendukung dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi dan studi tepat waktu.

MOTTO

Berlarilah menuju puncak yang anda impikan karena kelelalahan dan keletihan yang kita alami akan terbayar dengan keindahan yang kita rasakan ketika berada di puncak.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan kepada nabiullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakalah penulis skripsi yang berjudul "Implementasi Program Sosial Bank Indonesia kantor perwakilan wilayah Sulawesi Selatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan (Studi Kasus Pengembangan Desa Wisata Binaan Rammang-Rammang kabupaten Maros).

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapakan terima kasih kepada kedua orang tua penulis ayahanda **Abd. Salam** dan Ibunda **ST. Zohrah** yang senangtiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih. Dan ucapan terima kasih yang saya haturkan kepada saudarasaudari ku: **Ashbiyah Salam, S.Sos, Chaeriah, Marliah Salam, S,Pdi.,S.Pd**,

Syafaruddin,S.Sos, Kamaliah Salam, S,Pd yang senangtiasa mendukung dan memberi semangat hingga akhir studi dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan pendidikan strata satu di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

- Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM., Rektor Universitas
 Muhammadiyah Makassar
- Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
- 3. Ibu **Hj. Naidah,SE.,M.Si.,** Selaku ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- 4. Ibu **Dr. A. Ifayani Haanurat, MM** Selaku Pembimbing I yang senangtiasa meluangkan waktunya membimbing, mengarahkan, memotivasi penulis sehingga skripsi selesai dengan baik.
- Ibu Warda, SE.,ME., Selaku Pembimbing II yang yang senangtiasa meluangkan waktunya membimbing, mengarahkan, memotivasi penulis sehingga skripsi selesai dengan baik.
- Ibu Dra.Ek Nursiah Haddade, M.Si., Selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi dan arahan dalam menyelesaikan permasalahan pada dunia perkuliahan.

- Para Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar atas segala jerih payahnya membimbing penulis selama dibangku perkuliahan.
- 8. Bapak Bambang Kusmiarso selaku Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberikan izin dan arahan dalam melaksanakan penelitian mengenai PSBI di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Sulawesi Selatan.
- Bapak Aryo Setyoso Selaku Deputi Direktur Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Sulawesi Selatan yang senangtiasa memberikan arahan, motivasi, dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir.
- 10. Bapak Tedy Arif Budiman sebagai Asisten Direktur fungsi koordinasi dan Kebijakan Bank Indonesia dan Bapak Taufik Ariesta Ardhiawan sebagai Manajer Fungsi Koordinasi dan Kebijakan Bank Indonesia yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta bersedia menjadi informan dan meluangkan waktunya untuk diwawancarai dalam penelitian mengenai PSBI.
- 11. Bapak Makmur, Bapak Nasir selaku kepala Desa Salenrang, Ketua Kelompok Sadar Wisata, Serta Seluruh Masyarakat wisata Rammang-Rammang yang telah bersedia menjadi informan dan membantu penulis dalam melakukan penelitian di daerah Wisata Rammang-Rammang Kabupaten Maros.
- 12. Pemerintah Kabupaten Maros yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di kawasan wisata Rammang-Rammang Kabupaten Maros.

- 13. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi IESP angkatan 2014 terkhusus untuk kelas IESP 2 yang menjadi teman untuk belajar, berbagi dan teman curhat dalam proses perkuliahan.
- 14. Bapak Aip Suherman yang senangtiasa mendukung, mendoakan, dan memotivasi penulis sejak awal perkuliahan sampai proses penyusunan skripsi ini
- 15. Sahabat Indorunners Makassar (Jukueja Runners) yang senangtiasa memberikan dukungan, motivasi serta pengalaman dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
- 16. Siska Purnama dan Andi Rahman Setiawan yang senangtiasa memberikan dukungan khususnya pada saat observasi dan dokumentasi di desa Wisata Rammang-Rammang.
- 17. Sahabat Jalan-Jalan Tidak Jelas Muh Irham Ramli dan Melfa Chantika yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan penelitian ini.
- 18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dalam terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya penulis mendokan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua yang turut membantu dalam proses penyelesaikan tugas akhir ini kesempurnaan hanya milik Allah SWT, Olehnya penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khaerat, Wassalamu Alaikum Wr.Wb

Makassar, 14

Agustus 2018

Marsyad

Alganawi Salam

ABSTRAK

Marsyad Alganawi Salam, 2018 Implementasi Program Sosial Bank Indonesia kantor perwakilan wilayah Sulawesi Selatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan Studi Kasus Pengembangan Desa Wisata Binaan Rammang-Rammang kabupaten Maros. Skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Ifayani Haanurat dan Pembimbing II Warda.

Penelitian ini bertujuan untuk megetahui Implementasi Program Sosial Bank Indonesia kantor perwakilan wilayah Sulawesi Selatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan Studi Kasus Pengembangan Desa Wisata Binaan Rammang-Rammang kabupaten Maros. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriftif kualitatif, dengan subyek penelitian adalah dua orang pegawai Bank Indonesia KPW Sulawesi Selatan, satu orang Volunter penggerak desa wisata Rammang-Rammang, satu orang ketua kelompok sadar wisata, empat orang masyarakat desa Rammang-Rammang, dua orang pemilik perahu, satu orang kepala desa Salenrang, dengan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan pengambilan keputusan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah adanya bantuan program sosial Bank Indonesia kantor perwakilan Sulawesi Selatan maka kondisi kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan terutama dalam hal pendapatan masyarakat, infrastruktur daerah wisata, pendampingan masyarakat mengenai pengembangan desa wisata Rammang-Rammang kabupaten Maros.

Kata Kunci: Kesejahteraan, Pendapatan Masyarakat, Corporate Social Responsibility.

ABSTRACT

Marsyad Alganawi Regards, 2018 the implementation of social programs of Bank Indonesia's South Sulawesi region representative office in order to improve the well-being of the community of South Sulawesi, a case study of the development of the tourist village Assisted Rammang-Rammang district Maros. Theses Courses Economics development studies Faculty of Economics and business of the University of Muhammadiyah Makassar. Guided by Mentors I Ifayani Haanurat and Supervisor II Warda.

This research aims to know the implementation of social programs of Bank Indonesia's South Sulawesi region representative office in order to improve the well-being of the community of South Sulawesi, a case study of the development of Small-scale tourism village Rammang-Rammang Maros. The type of research used in this study using qualitative research deskriftif, with the subject of research is the two employees of the Bank Indonesia KPW South Sulawesi, one Volunter movers Rammang-Rammang tourism village, one person the Chairman of the Group of conscious tourism, four village community Rammang-Rammang, the two owners of the boat, one village chief Salenrang, with data analysis technique used is the reduction of the data, the presentation of data, and decision-making.

The results showed that after the assistance of social programs the Bank Indonesia Representative Office of South Sulawesi, then social welfare conditions experience increased especially in terms of people's income, the infrastructure of the tourist area, mentoring the community regarding the development of village tourism Rammang-Rammang Maros.

Keywords: Welfare, Community Income, Corporate Social Responsibility.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II. TINJUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Teori	9
1. Ekonomi Kesejahteraan	9
2. Kemiskinan	12

3. Dukungan Sosial	13
4. Pengawasan	14
5. Program Sosial Bank Indonesia	16
6. Definisi Corporate Social Responsibility	
7. Tujuan Corporate Social Responsibility	
8. Model Program Corporate Social Responsibility	
Implementasi Corporate Social Responsibility	21
B. Tinjauan Empiris	22
C. Kerangka Pikir	25
BAB III. METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian	27
C. Sumber Data	28
D. Pengumpulan Data	29
E. Instrumen Penelitian	29
F. Teknik Analisis	30
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Gambaran Umum	32
Sejarah Terbentuknya Kabupaten Maros	32
2. Luas Wilayah dan Pemerintahan	35
3. Desa Salenrang kabupaten Maros	36
4. Gambaran Umum Wisata Rammang-Rammang	37
5. Bank Indonesia kantor Perwakilan Sulawesi Selatan	38
B. Penyaijan Data	50

1. Implementasi Program Sosiai Bank Indonesia KPVV Sulawesi Selatan	
dalam upaya meningkatkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	
desa Rammang-Rammang kabupaten Maros	. 50
2. Kondisi Kesejahteraan masyarakat setelah pelaksanaan program sosi	al
Bank Indonesia kantor perwakilan wilayah Sulawesi Selatan di desa	
Rammang-Rammang kabupaten Maros	. 59
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	. 69
A. Kesimpulan	. 69
B. Saran	. 69
DAFTAR PUSTAKA	. 70
DAFTAR LAMPIRAN	. 72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan didirikannya Negara Indonesia yang telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

menyebutkan negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain itu juga terdapat dalam pancasila yaitu terdapat pada sila kelima menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Masalah kesejahteraan sosial di masyarakat yang semakin berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa masih banyak warga negara Indonesia yang belum terpenuhi hak dasarnya secara layak, hal ini karena masih banyak masyarakat yang hidup dalam kesejahteraan yang rendah dimana belum memperoleh pekerjaan tetap, serta penghasilan yang belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan. Akibatnya, masih banyak warga negara yang mengalami hambatan dalam melaksanakan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak.

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya mengatakan bahwa masalah-masalah sosial semakin berkembang dan belum teratasi di negara Indonesia dewasa ini seperti, kemiskinan, kejahatan, disorganisasi keluarga, masalah generasi muda, peperangan, pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat, masalah kependudukan, masalah lingkungan, dan birokrasi.

Masalah kemiskinan menjadi masalah utama dalam usaha meningkatkan kesejahteraan sosial. Karena masalah kemiskinan merupakan masalah besar yang akan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Kemiskinan menjadi perhatian banyak orang, karena diyakini kemiskinan merupakan permasalahan yang menghambat kesejahteraan. Di Indonesia, setiap kepala pemerintahan yang memimpin selalu memiliki visi

dan misi mengenai kemiskinan yang diwujudkan dalam berbagai program.

Tetapi kenyataan program-program yang dijalankan oleh pemerintah belum mampu untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Menurut Prijono Tjiptoherijanto (1977)kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan fisik maupun non fisik. Kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, sempitnya kesempatan kerja dan berusaha menjadi menjadi faktor utama dari masalah ini. Semakin sulitnya lapangan kerja mengakibatkan masyarakat sulit untuk mendapatkan pengahasilan dan mengakibatkan daya beli menjadi rendah. Disamping itu faktor kemiskinan juga disebabkan oleh bencana alam, peperangan, gaya hidup, serta terjadinya ketidakadilan sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat (Aditya Media,1999:9). Faktor eksternal dan internal juga mempengaruhi terjadinya kemiskinan disuatu daerah. Misalnya masalah kebudayaan kemiskinan seperti tradisi, karakter, pandangan hidup, pandangan teologis dan keagamaan, malas, pesimis, dan sifat negatif lain yang dapat menyebabkan kemiskinan. Sehingga dapat dikemukakan bahwa kemiskinan tidak hanya muncul dari struktur atau akibat dari kebijakan, kemiskinan juga muncul dari kebudayaan atau sub kebudayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui garis keluarga.

Indonesia diwakili oleh BPS dalam menetapkan indikator kamiskinan menggunakan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar yang diartikan bahwa kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari segi ekonomi dan memenuhi kebutuhan. Tahun 2015 BPS menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,58 juta jiwa, jumlah ini mengalami kenaikan apabila menggunakan indikator kemiskinan yang

diterapkan oleh Bank Dunia yaitu dengan penghasilan minimum 2 dollar Amerika Serikat perorang perhari. Mengingat pada tahun 2013 pemerintah menetapkan garis kemiskinan berdasarkan pendapatan kurang dari Rp. 309.000 perkapita per bulan.

Kemiskinan telah menjadi suatu masalah tersendiri di masyarakat, khususnya di desa Rammang-Rammang. Melihat masalah kemiskinan di desa Rammang-Rammang disebabkan oleh belum meratanya arah pembangunan serta infrastruktur yang tidak merata. Penduduk tergolong dalam kategori miskin pada umumnya berada di daerah atau pedesaan, jumlah penduduk miskin yang terdapat di kabupaten Maros pada tahun 2013 43.053 jiwa pada tahun 2014, jumlah ini mengalami penurunan dari tahun sebelumya yang berjumlah 40.130 jiwa. Kenaikan masalah kemiskinan di kabupaten Maros khususnya di desa Rammang-Rammang tidak hanya terjadi pada jumlahnya saja, dari segi kualitas kemiskinan semakin parah. Jarak antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin dan semakin lebar. Menurut BPS keparahan kemiskinan pada September 2015 mengalami kenaikan pada Maret 2016 menjadi 1,83. mengindikasikan kesenjangan antar penduduk semakin tinggi. Hal ini menyebabkan semakin rendahnya kemampuan daya beli masyarakat miskin karena ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, salah satu faktor terjadinya kemiskinan disebabkan oleh tingkat pengangguran terbuka (TPT). Semakin tingginya kualitas dan kuantitas kemiskinan perlu di antisipasi oleh semua stakeholder. Mengingat masalah kemiskinan bersifat multimensional mampu memunculkan masalah-masalah sosial lainnya.

Pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi masyarakat dan swasta juga memiliki tanggung jawab tersebut guna menciptakan kesejahteraan sosial. Sejak jatuhnya masa orde baru proses pembangunan yang dulunya bersifat *Top Down* lambat laun mulai berubah menjadi *Bottom Up* yang mana rakyat turut serta dalam menentukan proses suatu pembangunan tetapi bukan berarti tidak ada pengawasan dari pihak yang melaksanakan pembangunan itu, pengawasan tetap dilaksanakan guna tetap menjaga kelancaran suatu proses pembangunan disuatu wilayah tertentu. Model pembangunan berbasis *People Centre Development* mulai meluas, asyarakat dan korporasi dituntut untuk aktif memainkan perannya sebagai aktor pembangunan seluruh institusi diberi kebebasan penuh untuk turut dalam proses pembangunan di Indonesia.

Institusi ataupun korporasi yang ikut melakukan proses pembangunan dikenal dengan konsep corporate social responsibility (CSR) yang mana korporasi dituntut tidak hanya mengejar keuntungan keuangan semata (single bottom line), tetapi diwajibkan pula memperhatikan aspek sosial dan aspek lingkungan (triple bottom line). Ketiga aspek diatas menunjukkan konsep pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development)

CSR tidak hanya dilakukan oleh korporasi saja lembaga *non profit* juga melakukan tanggung jawab sosialnya, hal ini seperti yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Pada tahun 2005 hingga tahun 2010, CSR Bank Indonesia bersifat *Charity* namun mulai tahun 2011 hingga sekarang bersifat tidak hanya *charity* perlahan berubah menuju pemberdayaan berkelanjutan yang mampu meningkatkan nilai-nilai ekonomi, sosial dan lingkungan dalam

masyarakat dengan nama Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). Sesuai Undang-Undang Bank Indonesia No.3 tahun 2004, sebagai bank sentral Bank Indonesia diwajibkan untuk dapat mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat tiga pilar utama yang menjadi tugas Bank Indonesia yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan monoter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, stabilitas system keuangan. Selain menjalankan tugas utama tersebut Bank Indonesia diminta tetap memiliki kepedulian terhadap lingkungan (komunitas) sebagai wujud CSRnya.

Bank Indonesia dalam melaksanakan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) selalu menerapkan dan menjaga komitment dengan sangat baik, hal ini terbukti Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) beberapa kali mendapatkan penghargaan baik nasional maupun internasional karena program-program yang dilaksanakan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat luas. Penghargaan internasional tersebut diberikan dalam acara konfrensi pelaku CSR di kawasan Asia, Penghargaan yang didapat dalam kategori *product excellent* pada tahun 2015.

Bentuk CSR sebagai kepedulian kepada masyarakat ataupun komunitas memiliki arti yang sangat luas. PSBI merupakan bentuk kepedulian dan tanggung sosial Bank Indonesia untuk memecahkan masalah sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Bank Indonesia oleh karena itu dukungan dari masyarakat selaku penerima manfaat program sosial Bank Indonesia sangat diperlukan. Ada dua jenis Program Sosial Bank Indonesia yakni program strategis dan kepedulian

sosial. Program strategis mencakup program pengembangan ekonomi dan program peningkatan pengetahuan serta pemahaman masyarakat tentang tujuan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Sedangkan program kepedulian sosial, merupakan kegiatan kepedulian atau empati terhadap permasalahan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, kebudayaan, keagamaan, dan penanganan musibah dan bencana alam. Ruang lingkup tersebut merupakan aspek umum dalam Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) namun pada implementasinya dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah kantor perwakilan wilayah Bank Indonesia. Pada tahun 2016 Program Sosial Bank Indonesia bertemakan "Mendukung Pemulihan Ekonomi, Mendorong Ekonomi yang kuat, Berkesinambungan dan Inklusif".

Dari uraian diatas maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian terkait implementasi Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) kantor perwakilan wilayah Sulawesi Selatan. Batasan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada program penigkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu di desa wisata Rammang-Rammang kabupaten Maros.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah yang akan diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini :

 Bagaimana implementasi program sosial Bank Indonesia kantor perwakilan wilayah Sulawesi Selatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Rammang-Rammang Kabupaten Maros ? 2. Bagaimana kondisi kesejahteraan masyarakat setelah pelaksanaan program sosial Bank Indonesia kantor perwakilan wilayah Sulawesi Selatan di Desa Rammang-Rammang Kabupaten Maros ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan dari pelaksanaan penelitian ini antara lain :

- Mengetahui implementasi program sosial Bank Indonesia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Rammang-Rammang.
- Mengetahui kondisi kesejahteraan masyarakat setelah pelaksanaan program sosial Bank Indonesia di Desa Rammang-Rammang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

- Sebagai sumber pengetahuan dalam bidang ilmu kesejahteraan sosial mengenai kebijakan suatu perusahaan atau lembaga dalam melakukan tanggung jawab sosial (CSR)
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam bahan penyusunan untuk mengeluarkan kebijakan dalam suatu perusahaan/lembaga dalam melaksanakan program sosialnya khususnya mengenai upaya dalam meningkatkan kesejahateraan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Ekonomi Kesejahteraan

Ekonomi kesejahteraan merupakan suatu cabang ekonomi yang menggunakan teknik mikro ekonomi untuk mengevaluasi kesejahteraan pada tingkat agregat (seluruh ekonomi). Bidang bahasan dari ekonomi kesejahteraan berkaitan dengan bagaimana suatu kegiatan perekonomian dapat berjalan secara optimal (Allan M.Feldman:2000). Ekonomi kesejahteraan memikirkan prinsip keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga kegiatan ekonomi memberikan dampak positif terhadap para pelaku ekonomi sehingga ekonomi kesejahteraan merupakan suatu pembahasan yang tidak terlepas dari konteks ilmu sosial. Adapun pengertian kesejahteraan ekonomi menurut para ahli sebagai berikut:

Pre-conference working committee for the XVth International Conference
 of Social Welfare

Kesejahteraan sosial adalah usaha sosial secara keseluruhan yang terorganisir dan memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kehidupan orang berdasarkan konteks sosial. Ini termasuk kebijakan dan layanan yang berkaitan dengan berbagai kehidupan di masyarakat seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan, rekreasi, tradisi budaya.

2. Gertrude Wilson

Kesejahteraan sosial adalah kekhawatiran yang diselenggarakan dari semua orang untuk semua orang.

3. Walter Friedlander

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari institusi dan pelayanan sosial yang dirancang untuk membantu individu atau kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih baik.

Menurut Arthur Dunham kesejahteraan sosial juga diartikan suatu kegiatan yang terorganisir dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam beberapa bidang seperti, kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu, standar kehidupan dan hubungan sosial (T.Sumarnugroho,1987:28-31).

a. Faktor Non Ekonomi yang Menentukan Kesejahteraan.

Kehidupan masyarakat dalam suatu negara/wilayah tentu berbeda hal itu dapat dilihat dari berbagai faktor diluar faktor ekonomi khususnya pendapatan yang merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh dalam mengukur tingkat kesejahteraan, akan tetapi faktor non ekonomi seperti pengaruh adat istiadat dalam kehidupan masyarakat, keadaan iklim dan alam sekitar,serta ada tidaknya kebebasan bertindak dan mengeluarkan pendapat merupakan beberapa faktor yang akan menimbulkan perbedaan dalam tingkat kesejahteraan di suatu wilayah.

Sebagai contoh masyarakat yang masih terikat pada kebiasaan adat istiadat yang tradisional, misalnya masyarakat daerah Bali terpaksa mengerjakan berbagai kegiatan yang bersifat lebih memenuhi kebutuhan

sosialnya dan mengurangi daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. dalam masyarakat seperti ini, adalah kurang tepat untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kepada nilai dari hasil kegiatan ekonomi.

b. Faktor Lain yang Mempengaruhi Tingkat Kesejahteraan

Dalam bentuk yang spesifik nilai pendapatan sebagai suatu indeks untuk menunjukkan perbandingan tingkat kesejahteraan dan jurang tingkat kesejahteraan dikritik karena perbandingan dengan cara tersebut telah mengabaikan adanya perbedaan dalam berbagai hal seperti berikut:

- a). Komposisi umur penduduk
- b). Distribusi pendapatan masyarakat
- c). Pola pengeluaran masyarakat
- d). Komposisi pendapatan Nasional.
- e). Perbedaan masa lapang
- f). Keadaan pengangguran.

c. Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Pelaksanaan peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu disusun berdasarkan perencanaan, dimana didasarkan pada fakta bukan karena didorong oleh perasaan serta keinginan saja, akan tetapi kesejahteraan masyarakat meliputi kegiatan menginventarisi sumber daya yang telah tersedia dan dapat disediakan.

2. Kemiskinan

Dalam arti *proper*, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas Chambers (Chriswardani Suryawati, 2005) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu intergrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan dan pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidak berdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri (Chriswardani Suryawati, 2005). Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

- Kemiskinan absolut, kondiai dimana seseorang memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja.
- Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
- Kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau

- berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
- 4. Kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

3. Dukungan Sosial

Dukungan Sosial adalah infromasi atau umpan balik dari orang lain yang menunjukkan bahwa seseorang dicintai, diperhatikan, dihargai, dan dihormati, serta dilibatkan dalam jaringan komunikasi dan kewajiban timbal balik (King, 2012:226). Sedangkan menurut Ganster (dalam Appllo dan Cahyadi, 2012:261) dukungan sosial adalah tersedianya hubungan yang bersifat menolong dan mempunyai nilai khusus bagi individu yang menerimanya.

Adapun bentuk dukungan sosial menurut Cohen dan Hoberman (dalam Isnawati dan Suhariadi, 2013:3) yaitu :

- Appraisal Support, yaitu adanya bantuan yang berupa nasehat yang berkaitan dengan pemecahan suatu masalah untuk membantu mengurangi stressor.
- 2. *Tangiable Support*, yaitu bantuan yang nyata dan berupa tindakan atau bantuan fisik dalam menyelesaikan tugas.
- Self Esteem Support, yaitu dukungan yang diberikan oleh orang lain terhadap perasaan kompeten dan harga diri individu atau perasaan seseorang sebagai bagian dari sebuah kelompok dimana para

anggotanya memiliki dukungan yang berkaitan dengan self-esteem seseorang.

4. *Belonging Support*, yaitu menunjukkan perasaan diterima menjadi bagian dari suatu kelompok dan rasa kebersamaan.

Menurut Smet, (1994:136) terdapat empat jenis atau dimensi dukungan sosial, yaitu diantaranya sebagai berikut :

- Dukungan Emosional yaitu mencakup ungkapan empati, kepedulian dan perhatian terhadap orang yang bersangkutan.
- Dukungan Penghargaan yaitu terjadi lewat ungkapan hormat (penghargaan) positif untuk orang lain, dorongan maju atau persetujuan dengan gagasan atau perasaan, dan perbandingan positif orang itu dengan orang lain.
- Dukungan Instrumental mencakup bantuan langsung, seperti memberikan pinjaman uang kepada orang yang sedang dalam kesulitan.
- Dukungan Informatif, yaitu mencakup pemberian nasehat, petunjuk, sasaran atau umpan balik.

4. Pengawasan

Menurut Goerge R. Tery (2006) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, artinya mengevaluasi presentasi kerja dan apabila perlu dengan menerapkan tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telag ditetapkan.

Menurut Donnelly (1996) yang mengelompokkan pengawasan menjadi 3 tipe yaitu :

1. Pengawasan Pendahulu (*Prelimary Control*)

Pengawasan pendahulu yakni pengawasan yang terjadi sebelum pekerjaan dilakukan. Dimana pengawasan pendahulu bias menghilangkan penyimpanan penting pada kerja yang diinginkan, yang dihasilkan sebelum penyimpanan tersebut terjadi. Pengawasan pendahulu juga mencakup segala upaya manajerial untuk memperbesar kemungkinan hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil yang direncanakan. (Donelly, 1996).

Memusatkan perhatian pada masalah, mencegah timbulnya deviasi pada kualitas serta kuantitas sumber daya yang digunakan pada organisasi. Sumber daya ini harus memenuhi syarat-syarat pekerjaan yang ditetapkan oleh struktur organisasi yang bersangkutan.

2. Pengawasan pada saat kerja berlangsung (Cocurrent Control)

Pengawasan pada saat kerja berlangsung adalah pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Memonitor pekerjaan yang berlangsung untuk memastikan bahwa sasaran telah dicapai. *Cocurrent Control* terutama terdiri dari tindakan para *supervisor* yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka.

3. Pengawasan Feed Back (Feed Back Control)

Pengawasan dengan mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Pengawasan yang dipusatkan pada kinerja organisasional dimasa lalu. Tindakan korektif ditunjukkan kearah proses

pembelian sumber daya atau operasi aktual. Sifat khas dari metode pengawasan feed back adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil historikal, sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan masa lalu (Donnelly, 1996).

5. Program Sosial Bank Indonesia

Program Sosial Bank Indonesia atau PSBI merupakan bentuk kepedulian atau empati sosial Bank Indonesia untuk berkontribusi dalam membantu memecahkan masalah sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat. Melalui program sosial, Bank Indonesia juga berupaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Bank Indonesia.

Kontribusi yang diberikan sejak tahun 2005 tersebut, kini memasuki babak baru. Sejalan dengan program transformasi Bank Indonesia, PSBI juga berubah. Perlahan-lahan mulai meninggalkan paradigma filantropi, menuju pemberdayaan berkelanjutan yang mampu meningkatkan nilai-nilai ekonomi, sosial dan lingkungan di masyarakat. Lebih spesifik, PSBI kini difokuskan pada program pemberdayaan yang bertujuan pada penguatan ekonomi rumah tangga.

Bank Indonesia meyakini, bahwa sektor rumah tangga berperan penting dalam pilar ekonomi nasional seperti halnya sektor swasta dan pemerintah. Rumah tangga yang kuat secara ekonomi dan edukasi secara agregat dapat mendukung pencapaian stabilitas ekonomi, khususnya melalui pencapaian inflasi yang rendah dan terkendali.



Gambar.1 Arah Pengembangan PSBI

Dengan semangat dedikasi untuk negeri, Bank Indonesia didukung 45 kantor perwakilan di seluruh Indonesia berkomitmen untuk terus berkontribusi, berempati dan peduli dalam membantu mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi di masyarakat yang dapat memberikan nilai bagi negeri dan institusi.

PSBI meliputi dua jenis program, yakni Program Strategis dan Kepedulian Sosial. Program Strategis mencakup program pengembangan ekonomi dan program peningkatan pengetahuan serta pemahaman masyarakat tentang tujuan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Sementara Program Kepedulian Sosial, merupakan kegiatan kepedulian atau empati terhadap permasalahan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, kebudayaan, keagamaan, dan penanganan musibah dan bencana alam.

Tahun 2016, PSBI memiliki tema strategis tahunan "Mendukung Pemulihan Ekonomi Mendorong Pembangunan Ekonomi yang Kuat, Berkesinambungan dan Inklusif"

Dalam rangka mendukung fokus pemberdayaan kepada ekonomi rumah tangga, Bank Indonesia juga mengimplementasikan Program Unggulan yang terdiri Program Indonesia Cerdas dan Program Pemberdayaan Perempuan. Program Unggulan ini diharapkan dapat menjadi identitas dari Program Sosial Bank Indonesia.

1. Bentuk Program Sosial Bank Indonesia

Dalam menjalankan program sosial, Bank Indonesia berupaya tetap menjaga keselarasan program sosial dengan fungsi, tugas, dan kewenangan yang dimiliki. Memperhatikan hal tersebut, pelaksanaan program sosial Bank Indonesia diprioritaskan pada empat area :

- Sektor ekonomi yang dimiliki pengaruh besar ketahanan dan arah pergerakan ekonomi Indonesia ke depan yakni sektor rumah tangga.
- Pengembangan kualitas, daya saing, dan jiwa kepemimpinan generasi muda penerus bangsa.
- Pemberdayaan perempuan untuk mendukung perekonomian dar kesejahteraan rumah tangga.
- 4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kebudayaan bangsa untuk memelihara keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam dan menjaga nilai-nilai luhur dalam pembangunan berkelanjutan.

6. Definisi Corporate Social Responsibility

Adapun beberapa definisi Corporate Social Responsibility yaitu:

Corporate Social Responsibility adalah suatu mekanisme perusahaan untuk secara sadar mengintegrasikan sebuah perhatian terhadap lingkungan sosial kedalam operasi dan interaksinya dengan stakeholders yang melampaui tanggung jawab sosial di bidang hukum.

Menurut CSR Forum (Wibisono, 2007) Corporate Social Responsibility (CSR) didefinisikan sebagai bisnis yang dilakukan secara

transparan dan terbuka serta berdasarkan pada nilai-nilai moral dan menjunjung tinggi rasa hormat kepada karyawan, komunitas dan lingkungan

Harvard kenedy School mengeluarkan definisi yang kredibel dan lengkap yang melihat CSR sebagai suatu strategi, jadi CSR tidak hanya meliputi apa yang dilakukan organisasi atau perusahaan dengan keuntungan saja, tetapi juga bagaimana keuntungan tersebut dihasilkan yang lebih dari sekedar kedermawanan dan kepatuhan.

Melihat dari beberapa pengertian *Corporate Social Responsibility* maka semangat dalam berbagi dan menghargai antara satu dengan yang lain, hal itu juga terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 277 yang mana artinya sebagai berikut:

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala disisi tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati" (QS. Al-Baqarah (1):277).

Maka dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* adalah suatu kegiatan yang diambil suatu perusahaan atau instansi, dalam menciptakan kepedulian sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga tetap menjaga kelestarian lingkungan.

7. Tujuan Corporate Social Responsibility

Perusahaan melaksanakan Corporate Social Responsibility tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai perusahaan diantaranya adalah sebagai berikut:

 Memberikan kontribusi untuk kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan berdasarkan pandangan untuk mencapai suatu pembangunan yang berkelanjutan.

- Mendorong pembangunan kapasitas lokal melalui kerjasama yang erat dengan komunitas lokal, termasuk kepentingan bisnis. Selain mengembangkan perusahaan di pasar dalam dan luar negeri.
- Mendorong dan mengimplementsikan Good Corporate Government (GCG) serta mempraktikan tata kelola perusahaan yang sehat.

8. Model Program Corporate Social Responsibility

Menurut Saidi dan Abidin yang dikutip oleh Edi Suharto menjelaskan ada empat model atau pola *corporate social responsibility* yang umumnya dilakukan di Indonesia:

1. Keterlibatan Langsung

Dalam model ini perusahaan/instansi menjabarkan program corporate social responsibility secara langsung, misalnya perusahaan dalam melaksanakan program sosial baik dilakukan langsung oleh perusahaan/instansi tanpa melibatkan pihak ketiga. Biasanya yang menjalankan tugas ini adalah pejabat yang berada dalam bidang corporate social responsibility seperti corporate secretary, dan public affair manager.

2. Melalui Yayasan atau Organisasi Sosial Perusahaan

Perusahaan mendirikan yayasan sendiri dibawah naungan perusahaan atau grupnya, model ini merupakan adopsi dari model yang diterapkan di perusahaan negara maju. Dalam hal ini perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan. Contoh yayasan yang didirikan perusahaan sebagai *corporate social responsibility* adalah Yayasan Dharma Bhakti Astra, dan yayasan sahabat Aqua.

3. Bermitra dengan Pihak Lain

Perusahaan menyelenggarakan corporate social responsibility melalui kemitraan atau kerjasama dengan lembaga lain, misalnya lembaga sosial/organisasi non pemerintah, instansi pemerintah, dan universitas. kerjasama tersebut termasuk dalam mengelola dana corporate social responsibility maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.

4. Mendukung atau tergabung dalam suatu konsorsium

Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota, atau mendukung lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan tertentu. dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih memusatkan perhatian pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat hibah pembangunan. Pihak konsorsium atau lembaga semacam itu dipercayai oleh perusahaan-perusahaan yang mendukung secara pro aktif mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang disepakati bersama.

9. Implementasi Corporate Social Responsibility

Implementasi *Corporate Social Responsibility* adalah suatu tahapan pelaksanaan program tanggung jawab perusahaan yang telah direncanakan sebelumnya. Manajemen implementasi pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan dapat dilakukan dengan pola *charity*, *social activity*, dan *community development*.

1. Berbasis *charity*

Berarti dalam implementasi tanggung jawab sosial perusahaan bersifat karikatif, jangka pendek, *incidental*. Masyarakat sebagai penerima manfaat dijadikan sebagai objek yang menerima bantuan dari perusahaan.

2. Berbasis community development

Pelaksanaan implementasi tanggung jawab sosial model ini stakeholders dilibatkan dalam panglima common interest. Menggunakan prinsip simbiosis mutualisme sebagai pijakan pelaksanaan tanggung jawab sosial. Stakholder dilibatkan dalam perencanaan pembuatan program yang dapat meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan yang dikelola bersama lewat kegiatan produktif.

3. Berbasis social activity

Merupakan strategi pelaksanaan tanggung jawab sosial dengan bantuan jasa untuk meringankan atau membantu meringankan masyarakat.

B. Tinjauan Empris

Beberapa penelitian sebelumnya terkait tanggung jawab sosial perusahaan /instansi antara lain :

1. Lukus Defri Andrista Ardhi (2016) "Implementasi Corporate Social Reponsibility dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Rahayu (Studi pada PT. Pertamina Petrochina East Java di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban" Desa Rahayu merupakan tempat Joint Operating Body PT. Pertamina Petrochina East Java (JOB-PPEJ) melakukan pengolahan minyak mentah. Oleh karena itu, sudah menjadi

kewajiban perusahaan untuk mengimplementasikan program CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosial khusunya di Desa Rahayu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa rahayu. Adapun program CSR yang dilaksanakan meliputi empat bidang yaitu bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum. Oleh sebab itu, sangat diperlukan adanya manajemen yang lebih baik dalam pelaksanaan CSR serta hubungan yang lebih baik antar semua aktor yang terlibat dalam implementasi program CSR di JOB-PPEJ agar CSR yang dilaksanakan dapat berhasil dan tepat sasaran serta tercipta masyarakat yang mandiri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- 2. Febrina Permata Putri, (2012) "Impelementasi Corporate Social Responsibility dalam mempertahankan citra" dengan studi kasus pada PT. Angkasa pura 1 Yogyakarta pada program mitra dan kebinaan lingkungan dalam skripsi ini menjelaskan tentang implementasi CSR dan kaitannya dengan citra perusahaan pada masyarakat.
- 3. Yustisia Ditya Sari, (2013) "Implementasi Corporate Social Responsibility terhadap sikap komunitas pada program perusahaan (Studi kuantitatif Implementasi CSR terhadap sikap komunitas pada program "street children Sponsorship" migas Hess Indonesia)" dalam skripsi ini menjelaskan bahwa Corporate Responsibility Hess Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sikap komunitas serta juga menjelaskan bahwa implementasi CSR merupakan suatu aktivitas yang lebih menekankan pada prinsip suistainability, accountability,dan transparency.

- 4. Akbar Lageranna, (2013) "Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate social responsibility) pada perusahaan rokok (studi pada PT.Djarum Kudus, Jawa Tengah" dimana penelitian ini membahas mengenai sejauh mana tanggung jawab sosial perusahaan pada PT. Djarum Kudus serta bagaimana pengaruh pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Dimana hasil dari penelitian ini memberikan pengaruh positif terhadap masyarakat, baik masyarakat sekitar daerah perusahaan beroperasi maupun terhadap masyarakat Indonesia secara umum.
- 5. Edo Pramana Putra, (2016) "Dampak program bantuan sosial terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan kabupaten tertinggal di Indonesia "hasil penelitian dengan analisis regresi model data panel pertumbuhan ekonomi diketahui bahwa variabel bantuan kelembagaan sosial dan budaya, bantuan infrastruktur, dan bantuan ekonomi dan dunia usaha signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.

Dari beberapa penelitian-penelitian yang telah ada, penelitian mengenai implementasi program sosial Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan masih belum ada. Perbedaan yang antara skripsi yang ditulis dengan beberapa skripsi diatas terletak pada program CSR-nya yang berbeda, implementasi perusahaan, dan lokasi penelitiannya. Dalam penelitian ini pembahasan yang diutamakan adalah Implementasi Program Sosial Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan. Pada

pengembangan dan pemberian bantuan sosial masyarakat di Desa Rammang-Rammang.

C. Kerangka Pikir

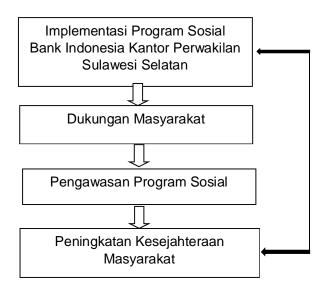
Bank Indonesia merupakan bank sentral yang dimiliki oleh Indonesia yang mana memiliki peranan penting dalam menjaga kondisi perekonomian Indonesia agar tetap dalam kondisi stabil, akan tetapi suatu kondisi ekonomi akan mengalami kestabilan apabila kondisi masyarakat berada dalam taraf kesejahteraan yang baik. Dengan demikian maka kesejahteraan masyarakat perlu untuk terus ditingkatkan, sejalan dengan hal itu maka Bank Indonesia kantor perwakilan Sulawesi Selatan sangat fokus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat yang berada pada taraf kesejahteraan rendah.

Maka Sejalan dengan hal itu Bank Indonesia kantor perwakilan Sulawesi selatan melakukan implementasi *corporate social responsibility* atau dalam bank Indonesia lebih dikenal dengan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan dalam ini memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang berada dalam lingkup masyarakat yang tingkat kesejahteraan rendah yakni masyarakat yang berada di Desa Rammang-Rammang Kabupaten Maros.

Pelaksanaan implementasi program sosial Bank Indonesia kantor perwakilan Sulawesi selatan akan tidak berjalan secara baik dan terarah tanpa adanya dukungan dari masyarakat yang berada di Desa Rammang-Rammang selaku penerima manfaat atau bantuan sosial Bank Indonesia, sehingga sinergi dan dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam melaksanakan implementasi program sosial bank Indonesia tersebut. Selain

itu pengawasan harus tetap dilaksanakan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan selaku pemberi bantuan sosial, agar program atau bantuan sosial yang diberikan dapat berjalan sebagaimana mestinya yakni dapat menigkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Desa Rammang-Rammang Kabupaten Maros.

Dari penjelasan di atas maka dapat dikemukakan kerangka pikir yang berfungsi sebagai penuntun alur pikir sekaligus sebagai dasar dalam merumuskan pembahasan selanjutnya.



Gambar 2. Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hariwijaya (2007:43) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang tidak menggunakan model matematik, statistik, atau komputer. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berfikir yang digunakan dalam penelitian. Asumsi dan aturan berfikir tersebut selanjutnya diterapkan secara sistematis dalam pengumpulan dan pengelahan data untuk memberikan penjelasan dan argumentasi. Penelitian kualitatif informasi yang dikumpulkan dan diolah harus tetap objektif.

Arikunto (2006:12) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak menggunakan angka dalam pengumpulan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya. Namun demikian tidak berarti bahwa dalam penelitian kualitatif ini peneliti sama sekali tidak diperbolehkan menggunakan angka. Dalam hal tertentu misalnya menyebutkan jumlah pekerja ketika menggambarkan kondisi suatu perusahaan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi Desa Rammang-Rammang Kabupaten Maros. alasan pengambilan lokasi penelitian di Desa Rammang-Rammang kabupaten Maros dikarenakan desa tersebut merupakan salah satu desa yang mendapat bantuan program sosial Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan. Sedangkan waktu yang digunakan untuk penelitian selama 2 (dua) bulan, terhitung bulan Maret sampai dengan Mei 2018.

C. Sumber Data

Sarwono (2006:209) menjelaskan pembagian data menurut jenisnya ada dua yaitu :

1. Data Primer

Adalah data yang diambil secara langsung dari sumber primer, dengan cara melakukan wawancara dan observasi. Data yang diambil secara langsung dari sumber primer, dengan cara melakukan wawancara dan observasi (Sarwono 2006:209). Data primer ini berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data untuk tujuan penelitian sehingga diharapkan nantinya penulis dapat memperoleh hasil yang sebenarnya dari masyarakat desa Rammang-Rammang dan Pengawai kantor Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan.

Subyek penelitian adalah orang yang menjadi sumber informasi dan memahami objek penelitian, dalam penelitian ini yang menjadi informan dalam penelitian adalah:

- 1). Tiga orang pengawai Bank Indonesia KPW Sulawesi Selatan
- 2). Lima orang masyarakat Desa Rammang-Rammang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Indriantoro,2002:147).

D. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif deskriptif ini dilakukan dengan menggunakan sumber data primer, dan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Untuk memperoleh data yang relevan mengenai masalah-masalah ini maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi atau pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dikhayati oleh subyek sehingga memungkinkan pula peneliti menjadi sumber data, pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama.

2. Wawancara

Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang yang dalam situasi saling berhadapan, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi kepada informan yang diteliti terkait pendapat dan keyakinannya.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam menggali informasi menggunakan potensi diri sendiri dengan menggunakan teknik wawancara langsung dan memanfaatkan audio sebagai sarana untuk menghasilkan data, serta foto sebagai bentuk dokumentasi.

F. Teknik Analisis

Data-data yang terkumpul dari hasil observasi dan wawancara kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan menggambarkan keadaan, realita, dan fakta yang ada. Data-data yang telah terkumpul tersebut, diseleksi dan disajikan kemudian ditafsirkan secara sistematis agar dapat menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori, atau gagasan baru yang disebut temuan.

Teknik analisis yang peneliti gunakan adalah analisis data selama di lapangan model Miles and Huberman. Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b. Data *Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

c. Conclusion Drawing/Verification

Dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan buktibukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Maros

Kabupaten Maros pada mulanya adalah suatu wilayah kerajaan yang dikenal sebagai Kerajaan Marusu yang kemudian bernama Kabupaten Maros sampai saat ini. Selain nama Maros, masih terdapat nama lain daerah ini, yakni Marusu dan/atau Buttasalewangan. Ketiga nama tersebut oleh sebagian masyarakat Kabupaten Maros sangat melekat dan menjadikan sebagai lambang kebanggaan tersendiri dalam mengisi pembangunan daerah. Kabupaten Maros pada awalnya adalah sebuah wilayah kerajaan yang dipengaruhi oleh dua kerajaan besar di Sulawesi Selatan, yakni Kerajaan Bone dan Kerajaan Gowa, yang mana pada waktu itu, Maros memiliki nilai strategis yang sangat potensial. Kabupaten Maros dari dulu hingga saat ini dihuni oleh dua suku, yakni Suku Bugis dan Suku Makassar.

Pada masa kemerdekaan, yakni tujuh tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 oleh pemerintah Republik Indonesia dikeluarkan peraturan No. 34 1952 juncto PP. No. 2/1952 tentang pembentukan Afdelling Makassar yang di dalamnya tercakup Maros sebagai sebuah Onderafdelling dengan 16 buah distrik masing-masing, Distrik Turikale, Distrik Marusu, Distrik Simbang, Distrik Bontoa, Distrik Lau, Distrik Tanralili, Distrik Sudiang, Distrik Moncongloe, Distrik Bira, Distrik Biringkanaya, Distrik Mallawa, Distrik Camba, Distrik Cenrana, Distrik Laiya, Distrik Wanua Waru, dan Distrik Gattarang Matinggi.

Seiring perjalanan waktu pada tahun 1959 secara administratif Maros menjadi daerah Swatantra Tingkat II berdasarkan Undang- Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat II di Sulawesi, pada saat itu status Maros sebagai

- 1. Pusat pelayanan transportasi udara internasional, yakni Bandar Udara Sultan Hasanuddin. Bandar udara ini terletak di Kecamatan Mandai yang merupakan wilayah perbatasan dengan Kota Makassar. Pertumbuhan pelayanan bandar udara Hasanuddin yang begitu pesatnya, sehingga dilakukan pengembangan bandar udara baru dengan luas lahan pengembangan 554,6 Ha. Bandara udara Hasanuddin merupakan wilayah pintu gerbang Sulawesi Selatan dan KTI yang mengindikasikan bahwa Kabupaten Maros adalah gerbang utama pembangunan regional dan nasional.
- 2. Pusat Penelitian Pertanian, yakni dengan adanya pengembangan Balai Penelitian Tanaman Sereal dan Tanaman Pangan yang berlokasi di Kecamatan Turikale. Balai penelitian ini melakukan serangkaian penelitian untuk menghasilkan inovasi teknologi pertanian sekaligus mendiseminasikan secara terarah guna mendukung upaya peningkatan produksi pertanian sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Selatan.
- 3. Pusat Penelitian Kelautan dan Perikanan, yakni dengan adanya kawasan riset tentang potensi kelautan dan perikanan. Hal iniu sangat mendasar karena wilayah Kabupaten Maros sebagai daerah pesisir dengan kontribusi pada sektor perikanan di Sulawesi Selatan cukup besar, terutama dalam memenuhi kebutuhan wilayah Kota

Makassar sebagai ibukota provinsi Sulawesi Selatan. Disamping itu, kegiatan perikanan yang diusahakan dan dikembangkan oleh masyarakat Kabupaten Maros adalah perikanan budidaya air payau yang mencapai luas tambak 9.461,53 Ha.

- 4. Militer, yaitu wilayah Kabupaten Maros merupakan wilayah yang dijadikan sebagai Pusat Pelatihan dan Pendidikan TNI-AD, yaitu dengan adanya kawasan pelatihan dan pendidikan Kostrad TNI-AD. Lokasi kegiatan ini berlokasi pada dua kecamatan, yakni Sambueja Kecamatan Bantimurung dan Kariango Kecamatan Tanralili. Disamping itu, Kecamatan Mandai juga di jadikan sebagai pangkalan udara TNI Angkatan Udara yang berlokasi di Bandar Udara Sultan Hasanuddin.
- 5. Pusat Kegiatan Keagamaan, yakni suatu kegiatan yang dilakukan oleh jamaah Halwatiah Sammang. Pada setiap hari besar Maulid Nabi Muhammad SAW, jamaah Halwatiah Sammang bersatu melakukan sikir akbar yang berlokasi di Patte'ne Kecamatan Marusu. Asal jamaah Halwatiah Sammang tersebut telah tersebar diseluruh nusantara, bahkan ada yang berasal dari Malaysia.
- 6. Bagian Wilayah Pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata, yaitu suatu kebijakan pengembangan wilayah yang pertama di KTI, dimana sebagian wilayah Kabupaten Maros masuk dalam Kawasan Perkotaan Metropolitan tersebut. Wilayah Kecamatan yang masuk dalam pengembangan ini adalah Kecamatan Mandai, Moncongloe, Tompobulu, Bantimurung, Marusu, Turikale, Tanralili, Lau, Maros Baru, Simbang, Bantimurung, dan

Bontoa. Dari luas wilayah pengembangan Kawasan Mamminasata sebesar 2.462 Km2, wilayah Kabupaten Maros yang menjadi bagian kawasan pengembangan tersebut adalah 1.039 Km2 atau 42,20%. Hal ini tentunya sangat memberi manfaat bagi wilayah Kabupaten Maros ditinjau dari segi penyediaan dan pembangunan infrastruktur, penyediaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, PAD dan lain sebagainya.

2. Luas Wilayah dan Pemerintahan

Kabupaten Maros adalah salah satu kabupaten yang terletak di bagian Barat Sulawesi Selatan antara 5°01'04.0" Lintang Selatan dan 119°34'35.0" Bujur Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Pangkep sebelah Utara, Kota Makassar dan Kabupaten Gowa sebelah selatan, Kabupaten Bone disebelah Barat. Luas wilayah Kabupaten Maros 1619,12 KM2 yang terdiri dari 14 (empat belas) kecamatan yang membawahi 103 Desa/kelurahan, Kabupaten Maros merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan ibukota propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini adalah Kota Makassar dengan jarak kedua kota tersebut berkisar 30 km dan sekaligus terintegrasi dalam pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata. Dalam kedudukannya, Kabupaten Maros memegan peranan penting terhadap pembangunan Kota Makassar karena sebagai daerah perlintasan yang sekaligus sebagai pintu gerbang Kawasan Mamminasata bagian utara yang dengan sendirinya memberikan peluang yang sangat besar terhadap pembangunan di Kabupaten Maros dengan luas wilayah 1.619,12 km2 dan terbagi dalam 14 wilayah kecamatan. Kabupaten Maros secara administrasi wilayah berbatasan dengan:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Bone
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kota Makassar
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Demikian pula sarana transportasi udara terbesar di kawasan timur Indonesia berada di Kabupaten Maros sehingga Kabupaten ini menjadi tempat masuk dan keluar dari dan ke Sulawesi Selatan.

3. Gambaran Umum Wisata Rammang-Rammang

Yang menjadi lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah desa wisata Rammang-Rammang Kabupaten Maros. Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai Maret 2018 sampai Mei 2018. Adapun penjelasan mengenai desa wisata Rammang-Rammang sebagai berikut:

Rammang-Rammang adalah sebuah tempat di gugusan pengunungan karst (kapur) Maros-Pangkep, letaknya di desa Salenrang, kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, sekitar 40 km di sebelah utara kota Makassar. Rammang-Rammang dapat ditempuh melalui jalur darat dengan kendaraan bermotor dalam waktu kurang lebih dua jam dari kota Makassar. Rammang-Rammang mudah dijangkau karena terletak hanya beberapa meter dari jalan raya lintas provinsi.

Nama Rammang-Rammang berasal dari Bahasa Makassar dimana kata Rammang berarti awan atau kabut, jadi Rammang-Rammang berarti sekumpulan awan atau kabut. Menurut cerita penduduk setempat, tempat ini diberi nama Rammang-Rammang karena awan atau kabut yang selalu turun terutama di pagi hari atau ketika hujan.

Kawasan karst Rammang-Rammang berada di titik koordinat 5' 13' 3 ' lintang selatan 119' 29' 37', luas taman hutan batu kapur Rammang-Rammang bertebar adalah 45.000 hektar dan merupakan kawasan karst terbesar ketiga di dunia setelah Tsingy di Madagaskar dan Shinin di Tiongkok. Terdapat dua kompleks taman hutan di Rammang-Rammang yakni di utara dan di selatan.

Kawasan wisata Rammang-Rammang memiliki nilai keindahan yang tinggi, variasi daya Tarik wisata sangat beragam, karst, vegetasi hutan, guagua serta flora dan fauna, kampung berua yang terisolir, gerombolan kelelawar yang keluar gua-gua di sore hari. Ketika pagi hari kabut menutupi kampung Rammang-Rammang, matahari baru terlihat di kampung Rammang-Rammang sekitar jam 10.

Kampung Rammang-Rammang berada di bagian dalam, pada saat itu warga merasa terisolir dimana lokasi pemukiman di kelilingi oleh pengunungan karst, dan masyarakat yang tinggal di kampung Rammang-Rammang berimigrasi keluar dengan membawa identitas mereka sebelumnya yaitu warga kampung Rammang-Rammang ke lokasi yang sekarang di kenal sebagai dusun Rammang-Rammang, kampung Rammang-Rammang masih ada, lokasinya berada di sekitar lokasi gua kunang-kunang.

Wisata Rammang-Rammang lahir karena adanya penolakan penambangan karst dan akhirnya secara tidak langsung menjadi tempat wisata alam, karena memiliki panorama alam yang menarik dan unik untuk wisatawan. Wisata alam Rammang-Rammang buah dari perjuangan yang panjang, pada Tahun 2005 dimana terdapat tiga perusahaan tambang yang

mendapat izin untuk melakukan pertambangan dengan luas 100 Ha di kawasan karst Rammang-Rammang. Namun aktivitas pertambangan pada saat itu belum beroperasi. Pada tahun 2008-2009 mulai terjadi aktivitas perusahaan membeli tanah warga, dan ini disadari oleh komunitas pencinta alam lingkungan dan masyarakat setempat yang sebagian besar terdiri dari mahasiswa dan pemuda.

5. Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Sulawesi Selatan

Yang menjadi lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah kantor Bank Indonesia provinsi Sulawesi Selatan selaku pemberi bantuan program sosial Bank Indonesia (PSBI).

a. Sejarah Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Sulawesi Selatan

KBI Makassar dalam Kilasan Sejarah Perjuangan Bangsa Cikal bakal keberadaan Bank Indonesia Makassar adalah sebagai kantor cabang ke empat De Javasche Bank yang dibuka pada tanggal 21 Desember 1864. Gagasan untuk mendirikan Kantor Bank Indonesia Makassar sudah timbul sejak lama yaitu beberapa waktu setelah didirikannya De Javasche Bank tanggal 24 Januari 1828. Gagasan tersebut terhambat ketentuan/peraturan De Javasche Bank yang membatasi wewenang direksi untuk melakukan kegiatan operasi di luar pulau Jawa dan ketentuan yang menetapkan pula bahwa bilyet-bilyet bank (uang kertas bank) sebagai alat pembayaran yang sah hanya berlaku di Pulau Jawa dan Madura. Dengan adanya ketentuan yang dikeluarkan pada tanggal 2 November 1859, wilayah operasi De Javasche Bank berubah hingga meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda.

Berdasarkan hal tersebut maka pada Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 6 Agustus 1864 diputuskan untuk mendirikan KC Makassar dengan persetujuan Gubernur Jenderal Hindia Belanda melalui surat keputusan tanggal 11 Agustus 1864. Adapun peresmiannya dilakukan tanggal 21 Desember 1864. Selanjutnya sesuai dengan UU No. 11/1953, sejak tanggal 1 Juli 1953 De Javasche Bank berubah menjadi Bank Indonesia.

Bank Indonesia Makassar pada saat pertama berdiri menggunakan ruang darurat di salah satu ruangan kantor "Factory Von De Nederlandsche Handel Maatschappij" cabang Makassar dan pada bulan Juni 1866 telah memiliki gedung sendiri di Jalan Jampea. Pada tahun 1912 KC Makassar membangun gedung kantor sendiri di Jalan Nusantara. Pembangunan gedung tersebut dilakukan bersamaan dengan pembangunan gedung Kantor Jakarta Kota dan Bank Indonesia Medan, sehingga pada ketiga gedung kantor tersebut tampak memiliki kesamaan bentuk arsitektur. Dengan adanya perubahan dari Bank Indonesia Makassar ke Bank Indonesia Ujung Pandang, tanggal 4 Maret 1978 Bank Indonesia Ujung Pandang menempati gedung baru di Jalan Jenderal Sudirman, sementara gedung lama digunakan oleh Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.

Adapun visi dan misi Bank Indonesia Kantor perwakilan wilayah Sulawesi Selatan.

1). Misi

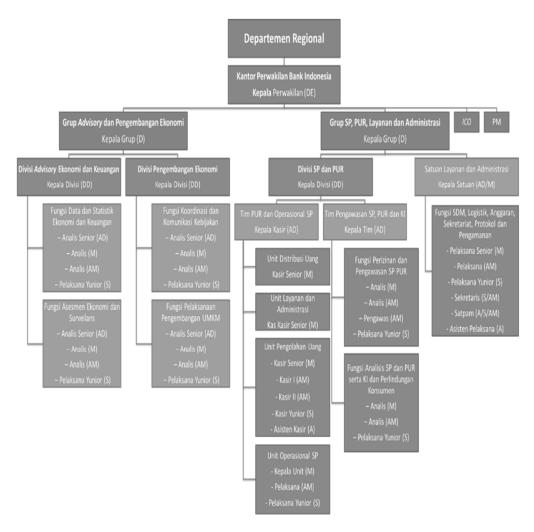
Berperan aktif dalam pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pelaksanaan kegiatan operasional di bidang ekonomi, moneter, perbankan, sistem

pembayaran secara efektif dan efisien dan peningkatan kajian ekonomi regional serta koordinasi dengan pemerintah daerah serta lembaga terkait.

2). Visi

Mewujudkan Kantor Bank Indonesia yang dapat dipercaya melalui peningkatan perannya sebagai economic intelligence dan unit penelitian.

Adapun struktur organisasi pada kantor Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Sulawesi Selatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 3. Struktur Organisasi Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Sulawesi Selatan

b. Job Description

Direktur Eksekutif:

- Bertanggung jawab akhir (akuntabel) mengarahkan dan menetapkan perumusan advesory kebijakan dalam rangka mendukung pengendalian inflasi,serta pengembangan ekonomi dan keuangan daerah.
- 2. Bertanggung jawab akhir (akuntabel) menetapkan hasil RFS Provinsi dalam rangka mendukung stabilitas sistem keuangan.
- Bertanggung jawab akhir (akuntabel) mengarahkan dan menetapkan program komunikasi kebijakan,dalam rangka mendukung fungsi advisory kebijakan Bank Indonesia.
- 4. Bertanggung Jawab Akhir (akuntabel) membangun jejaring (networking) dan koordinasi high level dan stakeholders internal dan ekternal Bank Indonesia dalam rangka mendukung pengendalian inflasi,serta pengembangan ekonomi dan keuangan daerah.
- 5. Bertanggung jawab akhir (akuntabel) mengarahkan dan menetapkan perumusan strategi pengembangan KI dan UMKM dalam rangka pengendalian inflasi dan pengembangan ekonomi dan keuangan daerah.
- Bertanggung jawab akhir (akuntabel) merencanakan dan mengendalikan fungsi PUR.
- Bertanggung jawab akhir (akuntabel) mengarahkan dan mengendalikan fungsi SP.

- 8. Bertanggung jawab akhir (akuntabel) mengarahkan dan mengendalikan pengawasan fungsi SP dan PUR termasuk persetujuan perizinan KLU dan rekomendasi perizinan kas titipan.
- Bertanggung jawab akhir (akuntabel) mengelola tata kelola (governance)
 pelaksanaan tugas satker termasuk fungsi enabler.
- Bertanggung jawab akhir (akuntabel) merencanakan dan mengarahkan pengelolaan menejemen kinerja dan pengendalian resiko.

2. Direktur (Kepala Grup Advisory dan Pengembangan Ekonomi)

- 1. Bertanggung jawab dalam perumusan advisory kebijakan dalam rangka mendukung pengendalian inflasi, serta pengembangan ekonomi dan keuangan daerah termasuk fasilitas penyelesaian permasalahan perekonomian daerah yang membutuhkan penyelesaian dari pemerintah pusat.
- 2. Bertanggung jawab akhir (akuntabel) koordinasi penyusunan advisory.
- Bertanggung jawab akhir (akuntabel) terhadap hasil pengumpulan data dan publikasi statistic daerah dalam rangka mendukung pengambilan keputusan di Kantor Pusat/atau Pemerintah Daerah.
- 4. Bertanggung jawab akhir (akuntabel) dalam pelaksanaan RFS (Provinsi) dalam rangka mendukung stabilitas sistem keuangan.
- 5. Bertanggung jawab untuk melakukan jejaring (networking) dan koordinasi high level dengan stakeholder internal dan ekternal Bank Indonesia dalam rangka mendukung pengendalian inflasi,serta pengembangan ekonomi dan keuangan daerah.

- Bertanggung jawab dalam membangun dan mengembangkan program komunikasi kebijakan dalam rangka mendukung fungsi advisory kebijakan Bank Indonesia.
- Bertanggung jawab dalam mengarahkan perumusan strategi pengembangan UMKM dalam rangka pengendalian inflasi dan pengembangan ekonomi dan keuangan daerah.

3. Deputi Direktur Kepala Divisi Advisory Ekonomi & Keuangan (DAEK)

- Bertanggung jawab dalam menganalisa usulan perumusan advisory kebijakan dalam rangka mendukung pengendalian inflasi, serta pengembangan ekonomi dan keuangan daerah.
- Bertanggung jawab dalam meningkatkan upaya-upaya fasilitasi penyelesaian permasalahan perekonomian daerah yang membutuhkan penyelesaian dari pemerintah pusat.
- 3. Bertanggung jawab akhir (akuntabel) dalam mengevaluasi dan menilai kualitas :
 - a. Pengumpulan dan komplikasi data dari stakeholders internal maupun eksternal.
 - b. Survei dan liaison
 - c. Pengelolaan Laporan.

Dalam rangka mendukung pengendalian inflasi serta pengembangan ekonomi dan keuangan daerah.

- 4. Bertanggung jawab akhir (akuntabel) dalam mengevaluasi dan menilai kualitas :
 - a. Penyusunan RFA dan/ atau RES
 - b. Analis RFS

- 5. Bertanggung jawab akhir (akuntabel) dalam mengevaluasi dan menilai kualitas :
 - a. Kajian dan analis isu-isu ekonomi dan keuangan daerah.
 - b. Analis kebijakan pemerintah daerah yang berdampak kepada ekonomi dan keuangan daerah dan kebijakan Bank Indonesia.
- 6. Bertanggung jawab akhir (akuntabel) untuk mengelola pelaksanaan kinerja, sumber daya serta pengendalian intern di unit kerja.

4. Asisten Direktur (Fungsi Data & Statistik Ekonomi Keuangan)

- 1. Bertanggung jawab dalam mengelola pelaksanaan :
 - a. Pengumpulan dan kompilasi data dari stakeholders internal maupun eksternal
 - b. Survei dan liaison
 - c. Pengelolaan Laporan
- 2. Bertanggung jawab dalam rangka mengelola pelaksanaan:
 - a. Kompilasi dan penyusunan RFA dan/ atau RBS
 - b. Analisis statistik RFS
- 3. Bertanggung jawab dalam mengelola pelayanan IDI dan SID

5. Asisten Direktur (Fungsi Asesmen Ekonomi & Surveilance)

- Bertanggung jawab dalam mengelola :
 - a. Kajian dan analisis isu-isu ekonomi dan keuangan daerah.
 - b. Analisis kebijakan pemerintah daerah yang berdampak kepada
 ekonomi dan keuangan daerah dan kebijakan Bank Indonesia
- Bertanggung jawab dalam mengelola pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan perekonomian daerah yang membutuhkan penyeleaian dari Pemerintah Pusat.

- 3. Bertanggung jawab dalam mengelola analisis RFS.
- Bertanggung jawab dalam memproyesikan indikator utama makroekonomi daerah.
- Bertanggung jawab dalam mengelola penyusunan rekomendasi kebijakan ekonomi dan keuangan daerah berdasarkan hasil asesmen dan kajian.

6. Manajer (Fungsi Data & Statistik Ekonomi Keuangan)

- 1. Bertanggung jawab dalam melaksanakan dan memverfikasi :
 - a. Kompilasi data dari stakeholders internal maupun eksternal
 - b. Survai dan Liaison
 - c. Pengelolaan Laporan

Untuk memperkuat pengambilan keputusan Kantor Pusat dan / atau Pemerintah Daerah.

- 2. Bertanggung jawab untuk memeriksa dan me-review
 - a. Kompilasi RFA dan /atau RBS
 - b. Bertanggung jawab untuk memeriksa dan memonitor pelayanan IDI dan SID.

7. Manajer (Fungsi Asesmen Ekonomi & Surveilance)

- Bertanggung jawab untuk memeriksa dan review :
 - a. Kajian dan analisis isu-isu ekonomi dan keuangan daerah.
 - b. Analisis kebijakan pemerintah daerah yang berdampak kepada ekonomi dan keuangan daerah dan kebijakan Bank Indonesia.
- Bertanggung jawab untuk mengusulkan dan memonitor pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan perekonomian daerah yang membutuhkan penyelesaian dari Pemerintah Pusat.

- 3. Bertanggung jawab untuk memeriksa dan me-review analisis RFS.
- 4. Bertanggung jawab dalam mengusulkan proyeksi indicator utama makroekonomi daerah.
- 5. Bertanggung jawab dalam mengusulkan rekomendasi kebijakan ekonomi dan keuangan daerah berdasarkan hasil asesmen dan kajian.

8. Asisten Manajer (Fungsi Data & Statistik Ekonomi Keuangan)

- 1. Bertanggung jawab dalam melaksanakan:
 - a. Kompilasi data dari stakeholders internal maupun eksternal:
 - b. Survei dan Liaison
 - c. Pengelolaan Laporan

Untuk memperkuat pengambilan keputusan Kantor Pusat dan / atau Pemerintah Daerah.

- 2. Bertanggung jawab dalam melaksanakan:
 - a. Kompilasi RFA dan / atau RBS
 - b. Analisis statistik RFS
- 3. Bertanggung jawab dalam menyediakan pelayanan IDI dan SID

9. Asiten Manajer (Fungsi Asesmen & Surveilance)

- 1. Bertanggung jawab dalam membuat :
 - a. Kajian dan Analisis isu isu ekonomi dan keuangan Daerah
 - b. Analisi kebijakan pemerintah daerah yang berdampak kepada ekonomi dan keuangan daerah dan kebijakan Bank Indonesia.
- Bertanggung jawab melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan perekonimian daerah yang membutuhkan penyelesaian dari pemerintah Pusat.
- 3. Bertanggung jawab dalam melaksanakan penyusunan analisis RFS

- 4. Bertanggung jawab dalam membuat proyeksi indikator utama makroekonomi daerah.
- 5. Bertanggung jawab dalam membuat usulan rekomendasi kebijakan ekonomi dan keuangan daerah berdasarkan hasil asesmen dan kajian.

9. Staf (Fungsi Data & Statistik Ekonomi Keuangan)

- 1. Bertanggung jawab dalam mendukung:
 - a. Pengumpulan dan kompilasi data dari stakeholders internal maupun eksternal.
 - b. Survei dan Liaison
 - c. Pengelolaan Laporan

Untuk memperkuat pengambilan keputusan Kantor Pusat dan / atau Pemerintah Daerah

- 2. Bertanggung jawab dalam mendukung:
 - a. Penyusunan RFA dan / atau RBS
 - b. Analisis statistik RFS
 - c. Bertanggung jawab dalam menyediakan pelayanan IDI dan SID.

10. Deputi Direktur Kepala Divisi Pengembangan Ekonomi (DPE)

Bertanggung jawab akhir (akuntabel) untuk mengelola jejaring (networking)

dan koordinasi level teknis dengan stakeholders internal dan ekternal Ba nk Indonesia.

- a. Pengembangan ekonomi dan keuangan daerah.
- b. Pengendalian Inflasi.
- c. Implementasi PSBI

- 2. Bertanggung jawab akhir (akuntabel) dalam mengimplementasikan pelaksanaan program komunikasi kebijakan.
- 3. Bertanggung jawab akhir (akuntabel) untuk mengelola pelaksanaan kinerja, sumber daya serta pengendalian intern di unit kerja.

11. Asisten Direktur (Fungsi Koordinasi & Komunikasi Kebijakan)

- Bertanggung jawab untuk mengelola jejaring (networking) dan koordiansi level teknis dengan stakeholders internal dan ekternal Bank Indonesia,meliputi :
 - a. Pengembangan ekonomi dan keuangan Daerah.
 - b. Pengendalian Inflasi
 - c. Implementasi PSBI
- Bertanggung jawab dalam mengimplementasikan program komunikasi kebijakan.

12. Manajer (Fungsi Koordinasi & Komunikasi Kebijakan)

- Bertanggung jawab dalam mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan program jejaring (networking) dan koordinasi dengan stakholders internal dan eksternal Bank Indonesia meliputi :
 - a. Pengembangan ekonomi dan keuangan dan keuangan Daerah.
 - b. Pengendalian Inflasi
 - c. Implementasi PSBI
- 2. Bertanggung jawab untuk mengusulkan dan memonitor pelaksanaan program komunikasi kebijakan.

13. Asisten Manajer (Fungsi Koordinasi & Komunikasi Kebijakan)

- Bertanggung jawab dalam melaksanakan program jejaring (networking)
 dan koordinasi dengan stakholders internal dan eksternal Bank
 Indonesia,terutama dalam rangka :
 - a. Pengembangan Ekonomi dan keuangan daerah.
 - b. Pengendalian Inflasi
 - c. Implementasi PSBI
- Bertanggung jawab dalam melaksanakan program komunikasi kebijakan.

14. Staf (Fungsi Koordinasi & Komunikasi Kebijakan)

- Bertanggung jawab dalam mendukung dan membantu pelaksanaan jejaring (networking) dan koordinasi dengan stakholders internal dan eksternal Bank Indonesia terutama dalam rangka:
 - a. Pengembangan ekonomi dan keuangan daerah
 - b. Pengendalian Inflasi
 - c. Implementasi PSBI
- 2. Bertanggung jawab dalam mendukung dan membantu pelaksanaan program komuniksi kebijakan.
- Bertanggung jawab dalam mendukung dan membantu pelaksanaan program strategis pengembangan UMKM dalam rangka pengendalian inflasi dan pengembangan ekonomi daerah.

B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)

 Implementasi Program Sosial Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Rammang-Rammang kabupaten Maros.

Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan Bank Indonesia tersebut, Bank Indonesia diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan monoter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta menjaga stabilitas sistem keuangan.

Pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan Bank Indonesia perlu disertai serta diperkuat dengan komunikasi yang efektif dengan pihak yang berkepentingan. Dalam melakukan komunikasi tersebut, Bank Indonesia dihadapkan pada berbagai kondisi yang membutuhkan kepedulian Bank Indonesia sebagai bagian dari komponen masyarakat. Oleh karena itu, Bank Indonesia melaksanakan program sosial sebagai wujud nyata dedikasi untuk mendukung aktivitas pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan pemahaman terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Hal ini sejalan dengan orientasi pengeloaan PSBI ke depan yang lebih diarahkan untuk mencapai pelaksanaan program sosial yang memberikan

nilai bagi masyarakat yang diimplementasikan dalam program pemberdayaan masyarakat sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Program pemberdayaan masyarakat yang dimaksud diwujudkan dalam program peningkatan kapasitas ekonomi, program peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemahaman publik, serta program kepedulian sosial yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan komunikasi Bank Indonesia yang meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Dalam hal program kepedulian sosial maka Bank Indonesia kantor perwakilan wilayah Sulawesi Selatan memberikan bantuan (PSBI) dalam rangka pegembangan desa wisata Rammang-Rammang kabupaten Maros. Yang menjadi latar belakang pemberian bantuan program sosial Bank Indonesia di desa wisata Rammang-Rammang di karenakan hal tersebut merupakan daerah wisata yang perlu mendapatkan bantuan dalam bentuk infrastruktur dan perbaikan fasilitas demi untuk memberikan rasa nyaman kepada pengunjung, selain itu daerah wisata Rammang-Rammang merupakan daerah pertambangan sehingga perlu untuk mendapatkan perhatian khusus sehingga akan tetap terjaga dan tidak dijadikan daerah pertambangan.

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan informan TAA dari Bank Indonesia kantor perwakilan wilayah Sulawesi Selatan yang mengatakan:

"Bahwa latar belakang sehingga memilih wisata Rammang-Rammang sebagai salah satu daerah penerima bantuan PSBI karena daerah tersebut merupakan salah satu daerah wisata yang butuh bantuan perbaikan infrastruktur, dan diharapkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru dibidang pariwisata, salain itu juga merupakan salah satu daerah pertambangan sehingga butuh perhatian sehingga nantinya tidak menjadi daerah pertambangan seperti daerah sekitarnya." (TAA/04/April 2018).

Selain hal diatas pemilihan desa wisata Rammang-Rammang sebagai penerima bantuan program sosial Bank Indonesia yaitu untuk menumbuhkan sumber pertumbuhan ekonomi baru dalam bidang pariwisata. Karena masyarakat mengalami pergesaran dalam hal pemenuhan kebutuhan yang dulu lebih berorientasi kepada benda dan barang, tetapi saat ini bertambah menjadi kebutuhan akan rekreasi dan wisata demi untuk memenuhi kepuasan batin setiap orang.

Penjelasan diatas sejalan dengan apa disampaikan oleh informan TAB dari Bank Indonesia kantor perwakilan wilayah Sulawesi Selatan saat wawancara mengatakan:

"Memilih rammang-rammang karena ingin menumbuhkan sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui industri pariwisata, karena masyarakat milenial saat ini yaitu lebih memilih kebutuhan layser dan berpetualang khsusunya di tempat wisata. Seperti yang kita lihat saat ini masyrakat berlomba-lomba untuk mencari objek wisata yang terbaru. Selain itu obejk wisata rammang-rammang karena kita melihat adanya multi player efek ketika kita memberikan PSBI sehingga kita satu kali masuk tetapi memiliki dampak yang luas untuk masyarakat. Tetapi hal itu dapat terwujud apabila masyarakat memiliki dukungan dan kepedulian akan objek wisata. Selain itu setelah kita memberikan fasilitas berupa infrastruktur kita akan melangkah pada pemberian capacity building ke masyarakat mengenai upaya pengembangan atau peningkatan wisata Rammang Rammang." (TAB/03/ April 2018)

Pendapatan yang sama juga disampaikan oleh informan IW mengatakan

"Pengembangan wisata Rammang-Rammang ini diharapkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, tidak hanya konsentrasi pada perahu namun juga terhadap home stay, café, dan warung yang mana saat ini sudah mulai terlihat dan berkembang."(IW/21/April 2018)

Hasil Wawancara dengan informan MJ dari anggota kelompok sadar wisata mengatakan bahwa:

"Pengembangan desa wisata Rammang-Rammang berbasis pemberdayaan masyarakat, serta pendampingan yang diberikan oleh Bank Indonesia sehingga masyarakat sekitar lebih sadar akan potensi wisata di daerahnya dan tetap menjaga sehingga lebih berkembang dan Bank Indonesia juga hadir sebagai support untuk masyarakat." (MJ1/8/ April 2018)

Dalam proses implementasi program sosial Bank Indonesia melalui beberapa tahap yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam perencanaan ini mencakup arah dan prioritas tahunan dan kompisisi anggaran indikatif tahunan untuk masing-masing program. Dalam hal pelaksanaan program sosial Bank Indonesia.

Hasil Wawancara dengan informan TAB dari Bank Indonesia Kantor perwakilan wilayah Sulawesi Selatan mengatakan :

"Tahapan pelaksanaan PSBI awalnya adanya suatu proposal dari kelompok sadar wisata mengenai peningkatan fasilitas di Rammang-Rammang kemudian melakukan survei, dan dilanjutkan dengan focus group disscussion untuk mencari informasi tentang Rammang-Rammang. Supaya PSBI yang kita berikan tepat sasaran setelah itu kita bekerjasama dengan pemerintah daerah diskusi dengan dispora, pemuka/tokoh masyarakat, selain itu kita juga harus mengetahui tata ruang karena daerah itu daerah geopark tentu itu memiliki ketentuan sehingga butuh diskusi dengan pemerintah daerah sehingga tidak melanggar aturan. Setelah itu kita melakukan diskusi dengan internal Bank Indonesia pusat. Serta memilih konsultan dan pelaksana, setelah itu kita diskusi dengan masyarakat setempat, kemudian setelah itu dikembalikan ke pemerintah daerah dan masyarakat, setelah itu kita melakukan lelang pengadaan dan melakukan pelaksanaan dengan tujuan untuk melibatkan peran aktif seluruh stakholders." (TAB/03/April/2018)

Penjelasan dari wawancara diatas koordinasi dilakukan sehingga bantuan program sosial yang kami berikan tepat sasaran, sehingga yang dibutuhkan oleh masyarakat benar terpenuhi. Selain koordinasi dengan masyarakat juga dilakukan koordinasi dengan pemerintah terkait dalam hal ini kelurahan, pemerintah daerah yang di bawahi oleh dinas pariwasata setempat.

a. Dukungan Masyarakat

Dukungan masyarakat dalam pelaksanaan program sosial Bank Indonesia di desa wisata Rammang-Rammang sangat perlu hal ini agar proses implemetansi program sosial berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Hasil Wawancara dengan infroman DG dari Masyarakat desa wisata Rammang-Rammang) mengatakan :

"Saya sangat mendukung dengan adanya bantuan program sosial Bank Indonesia karena membantu kami dalam perbaikan sarana dan prasarana khususnya prasarana jalan yang ada di kampung Berua sehingga para pengunjung merasa nyaman ketika berkunjung." (DG/21/April/2018)

Wawancara diatas menunjukkan bahwa masyarakat yang berada di daerah wisata Rammang-Rammang ikut mendukung dengan adanya bantuan program sosial Bank Indonesia kantor perwakilan Sulawesi Selatan. Hal ini ditandai dengan besarnya partisipasi masyarakat sekitar dalam menjaga fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia selaku pemberi bantuan.

Pernyataan yang sama disampaikan oleh informan MJ dalam wawancara mengatakan bahwa :

"Respon masyarakat sekitar sangat baik dan mendukung karena yang dulunya mereka harus keluar dan naik perahu ketika hendak melaksanakan shalat khususnya di saat bulan Ramadhan tetapi sejak adanya musholla yang dibangun oleh Bank Indonesia maka masyrakat merasa sangat terbantu. Selain itu saat ini bantuan program sosial Bank Indonesia sudah merata tidak hanya di kampung berua akan tetapi telah sampai ke dermaga dua yakni dengan adanya pembangunan gedung serbaguna sekaligus sebagai secretariat kelompok sadar wisata."(MJ/18/April/2018)

Dari wawancara diatas masyarakat sekitar merasa terbantu dan diberi kemudahan dengan adanya bantuan infrastruktur maupun sarana dan prasarana sehingga secara otomatis dukungan akan adanya bantuan sosial Bank Indonesia ini juga semakin besar seiring dengan bertambah luasnya wilayah yang mendapat bantuan dari Bank Indonesia.

Dukungan juga tidak hanya berasal dari masyarakat akan tetapi suatu program bantuan sosial akan berjalan sesuai yang diharapkan apabila mendapat dukungan dan *support* dari pemerintah setempat dalam hal ini kepala desa setempat.

b. Pengawasan Program Sosial

Pengawasan program sosial Bank Indonesia dilakukan setiap tiga bulan oleh pelaksana program sosial Bank Indonesia dan satuan kerja terkait di kantor pusat yang bersinergi. Pengawasan pelaksanaan program sosial Bank Indonesia disusun dalam bentuk laporan yang paling sedikit memuat, kesesuaian implementasi program dengan rencana program yang telah disetujui, realisasi anggaran, dan permasalahan atau kendala yang dihadapi. di mana laporan evaluasi/pengawasan pelaksanaan program sosial Bank Indonesia disusun setiap semester oleh satuan kerja yang melaksanakan fungsi komunikasi.

Hasil wawancara dengan informan TAA dari Bank Indonesia kantor perwakilan wilayah Sulawesi Selatan Mengatakan bahwa :

"Dalam hal pengawasan program sosial Bank Indonesia di Rammang-Rammang di monitor langsung oleh konsultan pengawas namun tetap dalam koordinasi Bank Indonesia serta pihak Bank Indonesia melakukan peninjauan setiap dua minggu sekali, dan juga kita memiliki whatsaap grup dengan pelaksana dan masyarakat sekitar".(TAA/04/April 2018)

Penjelasan dari wawancara di atas bahwa proses pengawasan dalam pelaksanaan program sosial Bank Indonesia di desa Wisata Rammag-Rammang melibatkan konsultan pengawas yang telah di tunjuk oleh Bank

Indonesia berdasarkan kapasitas dan *track record* konsultan pengawas tersebut serta masukan dari beberapa pihak sehingga pada proses pemilihan pengawas melalui sistem penunjukan secara langsung.

Pernyataan yang sama disampaikan informan TAB dari Bank Indonesia kantor perwakilan Sulawesi Selatan dalam wawancara mengatakan bahwa .

"Dalam hal pengawasan pelaksanaan program sosial dibantu oleh konsultan pengawas bangunan karena kami harus melaksanakan sesuai RAB".(TAB/03/April/2018)

c. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang kesejahteraan sosial, kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materi, spiritual, yang diliputi rasa keselamatan kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan suatu usaha pemenuhan kebutuhan jasmania, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban sesuai Pancasila.

Penjelasan diatas mengenai konsep kesejahteraan sosial sesuai dengan hasil wawancara dengan informan S dari Masyarakat Kampung Berua dan pemilik perahu yang mengatakan bahwa :

"Dengan adanya bantuan program sosial Bank Indonesia seperti perbaikan jalan, pemberian papan petunjuk menuju objek wisata, masjid, dan gedung serbaguna maka pendapatan yang saya dapatkan meningkat daripada sebelum ada bantuan dari Bank Indonesia karena banyak pengunjung yang datang disebabkan sudah merasa nyaman dengan adanya perbaikan infrasturktur terutama jalan, maka dengan demikian penghasilan daripada biaya sewa perahu yang saya miliki juga ikut bertambah karena pengunjung jika berkunjung kesini tentu menggunakan perahu, dimana sebelumnya pengunjung tidak seramai seperti sekarang ini. Sehingga pendapatan hanya dihasilkan dari empang dan sawah."(S/2/ April/2018)

Penjelasan dari wawancara di atas bahwa dengan adanya bantuan program sosial Bank Indonesia berupa perbaikan infrastruktur seperti jalan, papan petunjuk menuju objek lokasi wisata, masjid, dan gedung serbaguna maka jumlah pengunjung yang berkunjung semakin bertambah, dengan demikian secara otomatis pendapatan masyarakat juga ikut bertambah hal ini di dapatkan dari biaya sewa perahu yang dimiliki yang mana sebelum adanya bantuan Bank Indonesia masyarakat tidak terlalu berharap kepada penghasilan daripada perahu karena kurangnya pengunjung yang datang akan tetapi setelah adanya bantuan Bank Indonesia sebagian besar masyarakat beralih profesi menjadi tukang sewa jasa perahu penyebrangan karena pendapatan yang di dapatkan lebih meningkat dan lumayan besar menjanjikan. Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh informan I dari kelompok sadar wisata saat wawancara mengatakan bahwa:

"Sebagai objek wisata maka yang kita tawarkan adalah jasa sehingga apabila pengunjung merasa puas dengan pelayanan jasa yang diberikan maka secara otomatis mereka akan kembali berkunjung disuatu tempat wisata, dan setelah adanya bantuan dari Bank Indonesia maka terjadi peningkatan pengunjung yang singnifikan daripada sebelum adanya bantuan program sosial Bank Indonesia, dengan demikian maka pendapatan masyarakat juga ikut bertambah."(I/21/April/2018)

Penjelasan dari wawancara diaatas bahwa dengan adanya bantuan perbaikan fasilitas wisata maka ikut mendorong bertambahnya jumlah pengunjung ke wisata Rammang-Rammang khususnya di kampung Berua dan Rammang-Rammang pada umumnya. Selain itu pendapatan masyarakat tidak hanya didapatkan dari biaya sewa perahu pengunjung tetapi juga adanya pembagian hasil retribusi masuk kepada masyarakat.

Pernyataan yang sejalan juga di sampaikan inorman S dari masyarakat kampung Berua dan pemilik perahu saat wawancara mengatakan bahwa :

"Bahwa pendapatan dari biaya masuk itu dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk bantuan dan juga agar masyarakat tetap menjaga dan membersihkan lingkungan sekitar dari sampah baik dari pengunjung maupun sampah dari warga setempat." (S/21/April/2018)

Penjelasan dari wawancara diatas bahwa dengan adanya bantuan program sosial Bank Indonesia ikut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar desa wisata Rammang-Rammang hal ini disebabkan oleh adanya tambahan pendapatan dari sewa perahu dan juga pemberian bantuan dana dari hasil retribusi masuk yang dibagikan secara merata kepada masyarakat khususnya di kampung Berua yang merupakan jantung dari wisata Rammang-Rammang itu sendiri. Selain dari segi peningkatan pendapatan adanya pendampingan yang diberikan oleh Bank Indonesia berupa bagaimana melayani pengunjung dan memperlakukan suatu wisatawan dengan baik serta tetap membangun prinsip *Siri Na Pacce* sebagaimana filosofi masyarakat Bugis Makassar.

Kondisi kesejahteraan masyarakat setelah pelaksanaan program sosial Bank Indonesia kantor perwakilan wilayah Sulawesi Selatan di Desa Rammang-Rammang Kabupaten Maros.

Pemberian bantuan program sosial Bank Indonesia kepada desa wisata Rammang-Rammang merupakan suatu bentuk *corporate social responsibility* Bank Indonesia atau dalam Bank Indonesia lebih dikenal dengan istilah PSBI, adapun tujuan dari pemberian bantuan PSBI ini adalah memperkenalkan tugas dan fungsi dari Bank Indonesia kepada masyarakat di samping itu juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dipilihnya Rammang-Rammang sebagai daerah penerima bantuan program sosial Bank Indonesia karena adanya potensi peningkatan

kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat berbasis industri pariwisata.

Hal ini berdasarkan hasil Wawancara dengan informan DG Masyarakat Rammang-Rammang Mengatakan bahwa :

"Dengan adanya bantuan Bank Indonesia maka pendapatan mengalami peningkatan daripada sebelum adanya bantuan Bank Indonesia, disamping dari penghasilan dari perahu juga didapatkan dari pemesanan makanan prasmanan oleh para pengunjung yang berkunjung dan akan melaksanakan kegiatan di Rammang-Rammang. Karena saya juga menerima pemesanan makanan paket apabila ada pengunjung yang ingin memesan makanan dan hal itu baru dilaksanakan setelah adanya bantuan program sosial Bank Indonesia, karena melihat potensi pengunjung semakin banyak dan kegiatan yang Bank Indonesia lakukan serta instansi atau individu yang ikut memesan paket prasmanan tersebut selain itu banyaknya tamu dari luar kota yang memesan home stay"(DG/21/April 2018)

Penjelasan dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa dengan adanya bantuan program sosial Bank Indonesia maka secara langsung ikut mendorong timbulnya sektor pertumbuhan ekonomi baru dalam hal ini adalah industri kuliner di mana sebelum adanya bantuan program sosial Bank Indonesia maka masyarakat setempat belum ada yang membuka cafe, warkop, atau kios yang berbasis rumahan. Namun setelah adanya bantuan program sosial Bank Indonesia maka secara perlahan warkop, cafe dan usaha rumahan mulai bermunculan satu persatu.

Berikut hasil Wawancara dengan informan DS dari pemilik warung di kampung Berua mengatakan bahwa :

"Membuka warung rumahan sebelum adanya bantuan program sosial Bank Indonesia di Rammang-Rammang namun pengunjung yang datang sangat sunyi dan pendapatan yang dihasilkan pun sangat minim, akan tetapi setelah adanya bantuan program sosial Bank Indonesia maka usaha rumahan mengalami peningkatan pengunjung dan juga bertambahnya beberapa menu yang dihidangkan disebabkan oleh kebutuhan pengunjung serta semakin bertambahnya pendapatan sehingga memiliki modal untuk meningkatkan jumlah menu yang ditawarkan." (DS/22/April/2018)

Penjelasan dari wawancara diatas dengan adanya bantuan program sosial Bank Indonesia maka kondisi masyarakat sekitar mengalami perubahan khususnya dari segi perekonomian yang mengalami peningkatan selain itu juga adanya tambahan lapangan pekerjaan bagi ibu rumah tangga dengan membuka kios berbasis rumahan sehingga para ibu rumah tangga yang dulunya hanya berdiam tanpa ada kegiatan dan bergantung pada pendapatan kepala keluarga, akan tetapi sekarang sudah mampu mendapatkan penghasilan sendiri dari pendapatan penjualan setiap harinya, hal ini dikarenakan adanya penambahan pengunjung yang signifikan serta adanya perbaikan fasilitas yang dilakukan oleh Bank Indonesia kantor perwakilan wilayah Sulawesi Selatan.

Hasil wawancara dengan informan IC dari masyarakat dan pemilik perahu mengatakan bahwa :

"Pendapatan dari perahu sebelum adanya bantuan dari Bank Indonesia sangat sedikit karena belum banyak orang yang datang ke Rammang-Rammang, tetapi setelah adanya bantuan yang dilakukan oleh Bank Indonesia baik dikampung Berua maupun di dermaga dua Alhamdulillah pendapatan bertambah dan dulunya hanya lima perahu karena kurang pengunjung" (IC/21/April/2018)

Penjelasan dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya bantuan program sosial Bank Indonesia baik di kampung Berua maupun di dermaga dua ikut menambah jumlah pengunjung dan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan daripada sebelum adanya bantuan program sosial Bank Indonesia kantor perwakilan wilayah Sulawesi Selatan.

C. Pembahasan

Pada bagian pembahasan ini, peneliti menganalisis dan meinterpretasikan paparan data dan mendeskripsikan hasil penelitian lapangan melalui persandingan teori, konsep, fakta dan fenomena yang diteliti. Hasil deskripsi, analisis, dan interpretasi penelitian ini merupakan jawaban secara metodologis terhadap rumusan masalah penelitian.

 Implementasi Program Sosial Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Rammang-Rammang kabupaten Maros.

Mengacu pada Peraturan Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang program sosial Bank Indonesia dengan tujuan untuk mendukung efektivitas komunikasi kebijakan melalui pemberdayaan masyarakat dan kepedulian sosial yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Sebagai salah satu tugas dari Bank Indonesia adalah menjaga kestabilan ekonomi disuatu daerah dengan ini maka kantor perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan memberikan bantuan program sosial Bank Indonesia kepada desa wisata Rammang-Rammang sebagai suatu bentuk kepedulian sosial, di samping itu juga diharapkan dengan adanya implementasi program sosial di desa Rammang-Rammang dapat menjadi suatu sumber pertumbuhan ekonomi baru di Sulawesi Selatan yang berbasis industri pariwisata.

Namun tujuan pemberian bantuan program sosial Bank Indonesia tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dan sinergi dari masyarakat dan seluruh *stakholders* terkait. Hal itu dikarenakan pelaksanaan implementasi

program sosial bank Indonesia membutuhkan saran dan kritik dari penerima manfaat program sosial yaitu masyarakat dan pemerintah desa wisata Rammang-Rammang.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka terlihat bahwa masyarakat sekitar desa wisata Rammang-Rammang sangat mendukung dengan adanya bantuan program sosial yang diberikan oleh Bank Indonesia kantor perwakilan Sulawesi Selatan, hal itu terlihat dari antusias masyarakat dalam melayani pengunjung yang sangat semangat dibandingkan dengan sebelum adanya bantuan dan pendampingan yang diberikan oleh Bank Indonesia kantor perwakilan Sulawesi Selatan.

Dukungan masyarakat terhadap bantuan yang diberikan oleh Bank Indonesia tidak akan bernilai apabila tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Bank Indonesia itu sendiri baik selama pemberian bantuan sosial maupun ketika bantuan program sosial telah dilaksanakan. Karena pemberian yang diberikan berupa perbaikan infrastruktur dan pendampingan sehingga harus tetap dilakukan monitoring agar nantinya bantuan itu berguna sebagaimana mestinya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia selaku pemberi program sosial diserahkan kepada konsultan pengawas dan masyarakat sekitar akan tetapi tidak berarti Bank Indonesia tidak melakukan pengawasan. Dalam hal ini Bank Indonesia melakukan pengawasan setiap dua minggu sekali ke lokasi yang menerima manfaat program sosial Bank Indonesia dengan maksud agar apa yang dilaporkan oleh pengawas dan masyarakat sesuai atau dengan keadaan

yang ada dilapangan, sehingga tidak ada kontra antara pihak pengawas, masyarakat dan pihak Bank Indonesia itu sendiri.

Disamping itu dengan adanya bantuan program sosial bank Indonesia kantor perwakilan Sulawesi Selatan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar desa wisata Rammang-Rammang melalui pendapatan yang didapat oleh masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai pemberi jasa penyebrangan perahu.

Selain hal diatas upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Rammang-Rammang adalah dengan memberikan pendampingan kepada masyarakat mengenai pengembangan desa wisata melalui kelompok sadar wisata, sehingga masyarakat nantinya dapat menerima dan melayani pengunjung dengan harapan pengunjung tersebut merasa nyaman dan mendapatkan pelayanan prima.

Bantuan yang diberikan oleh Bank Indonesia juga berupa perbaikan infrastruktur yang mana menjadi suatu masalah utama yang terdapat di desa wisata Rammang-Rammang dalam hal perbaikan jalan serta pembangunan fasilitas seperti pembangunan mushollah dan gedung serbaguna yang juga berfungsi sebagai sekretariat kelompok sadar wisata, rambu-rambu petunjuk menuju lokasi, serta papan informasi wisata sehingga nantinya pengunjung lebih mudah menuju lokasi wisata.

Penelitian yang dilakukan juga membuktikan bahwa dengan adanya bantuan yang diberikan oleh Bank Indonesia kantor perwakilan Sulawesi Selatan memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat hal itu disebabkan oleh adanya perbaikan infrastruktur serta

pelayanan yang baik dari masyarakat sekitar yang dapat meningkatkan jumlah pengunjung. Pendapatan masyarakat juga didapat dari retribusi biaya masuk dimana kelompok sadar wisata berperan sebagai pengelola yang nantinya akan membagikan kepada masyarakat secara merata hasil dari retribusi tersebut sehingga masyarakat mendapat tambahan penghasilan.

Masyarakat sekitar juga mendapat penghasilan sampingan dari hasil usaha rumahan berupa warung makan, kios, café, serta jasa penyewaan topi mengingat desa wisata Rammang-Rammang termasuk daerah wisata yang bersuhu panas sehingga kebanyakan pengunjung membutuhkan topi sebagai pelindung dari terik sinar matahari langsung. Sehingga tujuan dari pemberian bantuan program sosial Bank Indonesia secara perlahan mulai terwujud yakni adanya sumber pertumbuhan ekonomi baru.

 Kondisi kesejahteraan masyarakat setelah pelaksanaan program sosial Bank Indonesia kantor perwakilan Sulawesi Selatan di Desa Rammang-Rammang Kabupaten Maros.

Adanya bantuan program sosial Bank Indonesia kepada desa wisata Rammang-Rammang ikut mendorong perkembangan desa wisata Rammang-Rammang karena adanya perubahan pandangan baru dalam pendekatan pembangunan objek wisata berbasis pendekatan masyarakat, sehingga masyarakat yang berada di desa Rammang-Rammang ikut terlibat langsung dalam pembangunan dan pengembangan objek wisata. Tujuan pengembangan desa wisata Rammang-Rammang selain meningkatkan peran serta tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan objek wisata yaitu menumbuhkan sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang dilakukan oleh peneliti kondisi masyarakat setelah adanya bantuan program sosial Bank Indonesia Kantor perwakilan Sulawesi Selatan di desa Rammang-Rammang mengalami peningkatan pendapatan dibandingkan dengan sebelum adanya bantuan program sosial Bank Indonesia. Dimana sebelum adanya bantuan program sosial Bank Indonesia kondisi pengunjung di daerah wisata Rammang-Rammang masih sangat kurang hal tersebut dipengaruhi oleh belum terlalu baiknya fasilitas yang membuat pengunjung merasa tidak nyaman seperti jalan masih menggunakan pematang sawah yang banjir dan becek ketika hujan, belum adanya fasilitas toilet yang baik untuk pengunjung, belum adanya papan petunjuk menuju objek wisata, serta belum adanya gedung serbaguna yang dapat di jadikan tempat beristirahat maupun sebagai tempat melaksanakan kegiatan.

Selain itu pendapatan masyarakat sebelum adanya program sosial Bank Indonesia hanya bergantung pada pendapatan dari bersawah dan tambak yang terkadang hasilnya tidak menentu terkadang berhasil namun terkadang juga kurang berhasil, dan tidak adanya pendapatan lain yang di dapatkan oleh ibu rumah tangga karena tidak adanya pekerjaan yang bisa membuat mereka mendapatkan penghasilan sampingan untuk membantu ekonomi keluarga tentunya.

Adapun kondisi kesejahteraan masyarakat setelah adanya program sosial Bank Indonesia terjadi peningkatan pendapatan didapatkan dari biaya sewa perahu dimana pada saat sebelum adanya program sosial Bank Indonesia penghasilan yang diperoleh pemilik perahu sangat minim karena kurangnya wisatawan yang berkunjung ke wisata Rammang-Rammang hal

itu disebabkan masih kurangnya fasilitas dan informasi mengenai objek wisata Rammang-Rammang. Selain itu pengunjung yang berkunjung juga mengalami penurunan apabila musim hujan karena akses jalan menuju lokasi tergenang air tetapi dengan adanya perbaikan jalan yang dilakukan oleh Bank Indonesia maka pengunjung tetap dapat berjalan menuju objek wisata tanpa khawatir dengan genangan air.

Masyarakat sekitar objek wisata juga mengalami tambahan pendapatan khsususnya ibu rumah tangga yang mana dulunya sebelum ada program sosial Bank Indonesia hanya berdiam diri tanpa ada kegiatan akan tetapi dengan adanya bantuan program sosial Bank Indonesia berupa perbaikan infrastruktur yang juga ikut mendorong penambahan jumlah pengunjung, membuat ibu rumah tangga membuka warung atau kios yang berbasis usaha rumahan yang mana menyediakan berbagai menu untuk pengunjung dan jumlah menu juga mulai bervariasi setelah adanya bantuan program sosial Bank Indonesia karena semakin bertambahnya pendapatan pemilik warung maka menu yang ditawarkan juga ikut bervariasi.

Selain hal diatas Kondisi kesejahteraan masyarakat di desa Rammang-Rammang dapat dilihat dari bertambahnya jumlah perahu yang beroperasi yang dulunya sebelum adanya program sosial Bank Indonesia jumlah perahu hanya terdapat lima unit namun setelah adanya program sosial Bank Indonesia semakin bertambah menjadi tujuh belas unit dan sampai saat ini menjadi seratus tujuh puluh lima unit yang dibagi menjadi dua tempat operasi yaitu dermaga satu dan dermaga dua. Itu membuktikan bahwa pendapatan dari jasa penyebrangan perahu bisa memenuhi kebutuhan masyarakat serta menambah pendapatan yang dulunya hanya bergantung pada hasil sawah

dan tambak. Kesejahteraan masyarakat di desa Rammang-Rammang juga terlihat dengan semakin terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat, dimana setelah adanya program sosial Bank Indonesia masyarakat mendapatkan pekerjaan dengan berprofesi sebagai penyedia jasa perahu, jasa parkir, dan jasa penyewaan topi dan tentu hal tersebut ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi Program sosial Bank Indonesia kantor perwakilan wilayah Sulawesi Selatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan studi kasus pengembangan desa wisata binaan Rammang-Rammang kabupaten Maros. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa Implementasi Program Sosial Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya perbaikan infrastruktur dan fasilitas di desa wisata Rammang-Rammang serta adanya pendampingan masyarakat mengenai proses pengembangan wisata melalui pemberdayaan masyarakat yaitu pemahaman mengenai pengembangan industri pariwisata
- 2. Kondisi kesejahteraan masyarakat di desa Rammang-Rammang setelah adanya program sosial Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan dari hasil penelitian dapat dlilhat bahwa terdapat berbagai peningkatan khususnya peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan jumlah perahu, peningkatan usaha berbasis rumahan, serta adanya sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui industri pariwisata.

B. Saran

Setelah dilakukan penelitian tentang Program sosial Bank Indonesia kantor perwakilan wilayah Sulawesi Selatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan studi kasus pengembangan desa wisata binaan Rammang-Rammang kabupaten Maros. Terdapat beberapa saran yang peneliti berikan sebagai berikut:

- Saran kepada Bank Indonesia selaku pemberi PSBI, perlu adanya pemerataan dalam pemberian bantuan program sosial, serta lebih memperhatikan keperluan mendasar yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar.
- Bank Indonesia khususnya kantor perwakilan wilayah Sulawesi Selatan lebih banyak melibatkan masyarakat terutama di desa wisata Rammang-Rammang secara keseluruhan dalam pengambilan keputusan sehingga masyarakat tidak merasa terdiskriminasi.
- Perlu adanya pendampingan (capacity Buliding) yang lebih konkrit kepada masyarakat mengenai bangaimana mengelola suatu objek wisata berbasis geopark.
- 4. Perlu adanya peningkatan fasilitas pendukung seperti gazebo sehingga para wisatawan yang berkunjung dapat beristirahat setelah lelah melakukan perjalanan dari objek wisata khususnya di daerah kampung Berua.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhi, L.D.A. 2016. Implementasi Corporate Social Reponsibility dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Rahayu (Studi pada PT. Pertamina Petrochina East Java di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, *Jurnal Elektronik Mahasiswa Administrasi Publik*, (Online),Vol.4,No.8,(http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/ind ex.php/jap/article/view/1349, diakses 10 Januari 2018).
- Feldman, M. Allan. 2000. *Ekonomi Kesejahteraan*. Universitas Atma Jaya: Yogyakarta
- Hasanah Mauizatul. 2017. Pengelolaan Parawisata Alam Berbasis Masyarakat (Kasus Objek Wisata Alam Rammang-Rammang Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Skripsi tidak diterbitkan. Makassar Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.
- Indriantoro Nur. 2002. *Metodelogi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Cetakan* 2. BPFE Yogyakarta: Yogyakarta
- Ilmu ekonomi ID,2016. Pengertian CSR (*Corprorate Social Responbility*) http://www.ilmu-ekonomi-id.com/2016/10/pengertian-csr-manfaat-fungsi-contoh-csr-perusahaan.html diakses pada tanggal 28 desember 2017 pukul 08.30
- Isnawati, Dian & Suhariadi Rendi. (2013). Hubungan antara Dukungan Sosial dengan Penyesuaian Diri Masa Persiapan Pensiun pada Karyawan PT Pupuk Kaltim. *Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi*. Vol. 1, Februari 2013, Hal. 1-6. Departemen Psikologi Industri dan Organisasi Fakultas Psikologi Universitas Airlangga.
- Jonathan, Sarwono. 2006. *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Graha Ilmu: Yogyakarta
- Lageranna, A. 2013. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate social responsibility) pada perusahaan rokok (studi pada PT.Djarum Kudus, Jawa Tengah. Skripsi tidak diterbitkan. Makassar: Hukum Universitas Hasanuddin.
- Mutmainnah sitti, 2017. Rancang bangun sistem virtual tour wisata alam Rammang-Rammang di desa Salenrang kabupaten Maros menggunakan pendekatan panorama 360 web. Skripsi tidak diterbitkan.Makassar.Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang Program Sosial Bank Indonesia. 2018. Jakarta. Dewan Gubernur Bank Indonesia

- Putra, E. P. 2016. Dampak program bantuan sosial terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan kabupaten tertinggal di Indonesia. Tesis tidak diterbitkan. Bogor : Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor
- Putri, F.P. 2012. Impelementasi Corporate Social Responsibility dalam mempertahankan citra" dengan studi kasus pada PT. Angkasa pura 1 Yogyakarta. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Ramayanti, T.B. 2016. Studi Komparasi Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Menjadi Desa Wisata, Studi kasus Desa Banjarsasri kecamatan Kalibawang. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- R.Terry, George, 2006. Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi aksara
- Sari, Y.D. 2013. Implementasi Corporate Social Responsibility terhadap sikap komunitas pada program perusahaan (Studi kuantitatif Implementasi CSR terhadap sikap komunitas pada program "street children Sponsorship" migas Hess Indonesia), *E-Journal*, (Online), (http://repository.petra.ac.id/16749/, diakses 25 Desember 2017).
- Sugiono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Alfabeta: Bandung
- Suharto Edi,2009. Pekerja Sosial Di Industri Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility). Alfabeta: Bandung
- Sumarnugroho, T. 1987. Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial. PT. Hanindita Graha Widya: Yogyakarta
- Suryawati. 2004. Teori Ekonomi Mikro. Jarnasy: Yogyakarta
- Teguh,2017.Pengertian Implementasi Menurut Parah Ahli, KBBI, Beserta contohnya https://www.satujam.com/pengertian-implementasi/ diakses pada tanggal 27 desember 2017 pukul 22.03
- Undang-Undang Republik Indonesia tahun No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. 2007. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia tahun No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. 2007. Jakarta
- Yusuf Wibisono.2007. Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility). PT. Gramedia: Jakarta

LAMPIRAN DATA DOKUMENTASI



WAWANCARA DENGAN BAPAK TAA (ASITEN DIREKTUR FUNGSI KOORDINASI KOMUNIKASI DAN KEBIJAKAN) BANK INDONESIA KANTOR PERWAKILAN WILAYAH SULAWESI SELATAN TANGGAL 04 APRIL 2018



WAWANCARA DENGAN BAPAK TAB (ASITEN DIREKTUR FUNGSI KOORDINASI KOMUNIKASI DAN KEBIJAKAN) BANK INDONESIA KANTOR PERWAKILAN WILAYAH SULAWESI SELATAN TANGGAL 03 APRIL 2018



WAWANCARA DENGAN BAPAK MJ (ANGGOTA KELOMPOK SADAR WISATA) WISATA RAMMANG-RAMMANG TANGGAL 05 APRIL 2018



WAWANCARA DENGAN BAPAK IW (KETUA KELOMPOK SADAR WISATA) WISATA RAMMANG-RAMMANG TANGGAL 21 APRIL 2018



WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT WISATA RAMMANG-RAMMANG TANGGAL 21 APRIL 2018



BANTUAN PSBI DALAM BENTUK GEDUNG SERBAGUNA



KUNJUNGAN KE LOKASI PSBI BERSAMA ROMBONGAN BANK INDONESIA KANTOR PERWAKILAN WILAYAH SULAWESI SELATAN PADA TANGGAL 06 APRIL 2018



PETA LOKASI WISATA RAMMANG-RAMMANG YANG DIBUAT OLEH BANK INDONESIA KANTOR PERWAKILAN WILAYAH SULAWESI SELATAN



BANTUAN DALAM BENTUK PERBAIKAN JALAN MENUJU DESTINASI WISATA



BANTUAN DALAM BENTUK SPOT FOTO UNTUK PENGUNJUNG



BANTUAN DALAM BENTUK PEMBANGUNAN MUSHOLLAH



BANTUAN DALAM RAMBU PETUNJUK KE LOKASI WISATA



BANTUAN DALAM RAMBU PETUNJUK KE LOKASI WISATA



BANTUAN PROGRAM SOSIAL DALAM BENTUK GEDUNG SERBAGUNA